

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI
SUMBER AGUNG KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

M. IQBAL KURNIAWAN

NPM 2016041058



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI SUMBER AGUNG KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh:

MUHAMMAD IQBAL KURNIAWAN

Pengembangan Pariwisata menjadi salah satu tujuan utama Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung dalam memajukan pariwisata di Provinsi Lampung. hal ini terumus pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Permenparekraf) Nomor 9 Tahun 2021 mengatur pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan, termasuk pengelolaan, sosial ekonomi, budaya, dan lingkungan. Pedoman ini berlaku untuk pemerintah dan pemangku kepentingan lain dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung memiliki program pengembangan desa wisata yang ada di Bandar Lampung. Salah satu desa wisata yang memiliki akan kekayaan potensi alam, budaya, serta lokal adalah Desa Wisata Sumber Agung. Dalam berjalannya program ini dalam empat tahun terakhir tidak semuanya berjalan dengan lancar dan maksimal, masih terdapat beberapa masalah ataupun kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program pengembangan desa wisata di Sumber Agung. serta mendeskripsikan faktor penghambat atas penerapannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi dikaji dengan teori indikator kinerja Merille S. Grindle. Pelaksanaan pada program ini memberikan banyak manfaat pada masyarakat Sumber Agung dan pihak pihak yang terlibat di Desa Wisata Sumber Agung. Namun masih terdapat kendala seperti kurang konsisten dan komunikasi antara pihak yang terlibat. Dari hasil penelitian ini, peneliti merekomendasikan saran untuk Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung agar memberikan perencanaan dan pelaksanaan yang strategis, memonitoring pelaksanaan program, serta mengevaluasi secara rutin dengan pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Implementasi Program, Pengembangan Pariwisata, Program, Desa Wisata, Digitalisasi Wisata.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE TOURISM VILLAGE DEVELOPMENT PROGRAM IN SUMBER AGUNG BANDAR LAMPUNG CITY.

By:

MUHAMMAD IQBAL KURNIAWAN

Tourism development is one of the main objectives of the Bandar Lampung City Tourism Office in advancing tourism in Lampung Province. This is formulated in the Minister of Tourism and Creative Economy Regulation (Permenparekraf) Number 9 of 2021 which regulates guidelines for sustainable tourism destinations, including management, socio-economic, cultural and environmental. These guidelines apply to governments and other stakeholders in sustainable tourism development. The Bandar Lampung City Tourism Office has a tourism village development program in Bandar Lampung. One of the tourist villages that has a wealth of natural, cultural and local potential is the Sumber Agung Tourism Village. In the course of this program in the last four years, not everything has run smoothly and optimally, there are still several problems or obstacles. This research aims to analyze the implementation of the tourism village development program in Sumber Agung, and describe the factors inhibiting its implementation. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, documentation and observations studied using Merille S. Grindle's theory of performance indicators. Implementation of this program provides many benefits to the Sumber Agung community and the parties involved in the Sumber Agung Tourism Village. However, there are still obstacles such as lack of consistency and communication between the parties involved. From the results of this research, the researcher recommends suggestions for the Bandar Lampung City Tourism Office to provide strategic planning and implementation, monitor program implementation, and evaluate regularly with the parties involved.

Keywords: Implementation of Program, Tourism Development, Programs, Tourism Villages, Tourism Digitalization.

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI
SUMBER AGUNG KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

**MIQBAL KURNIAWAN
2016041058**

(Skripsi)

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN
DESA WISATA DI SUMBER AGUNG KOTA
BANDAR LAMPUNG.**

Nama Mahasiswa : M. Iqbal Kurniawan

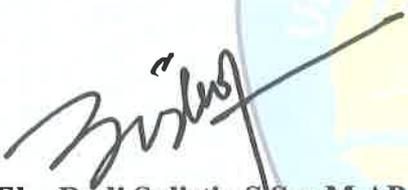
Nomor Pokok Mahasiswa : 2016041058

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

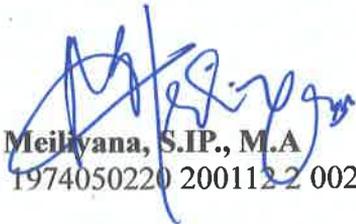


Eko Budi Sulistio, S.Sos, M.AP.
NIP. 19780923 200312 1 001



Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si
NIP. 19821212 200801 2 017

2. **Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara**



Meiliyana, S.IP., M.A
NIP. 1974050220 200112 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji:

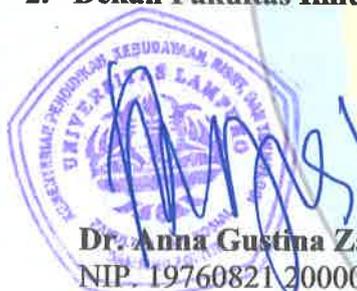
Ketua : **Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.**

Sekretaris : **Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.**

Penguji : **Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si.
NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi, 11 Desember 2024

PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini muni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 11 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



M Iqbal Kurniawan
NPM 2016041058

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Palembang pada tanggal 22 Januari 2002. Dibesarkan dalam keluarga sederhana dari Bapak Bambang Hermawan dan Ibu Kurniati dan merupakan anak pertama dari tiga saudara dan memiliki dua adik laki laki yang bernama Dhito Rahmad Kurniawan dan Bintang Kurniawan.

Pada tahun 2006 Penulis mengawali pendidikan di tingkat Taman Kanak-Kanak di TK Azizah Bandar Lampung, kemudian dilanjutkan Sekolah Dasar di Lukel School tahun 2008 dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 2 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 9 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2020. Kemudian, pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa baru di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur Seleksi SBMPTN hingga saat ini. Selama menjadi mahasiswa penulis mengikuti beberapa kegiatan, mulai dari kegiatan Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara dan pada tahun 2023 penulis mengikuti kegiatan KKN di Pekon Pajar Bulan, Pesisir Barat dan mengikuti MBKM FISIP yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung selama 6 bulan.

MOTTO

“Being Kind and Always Spread Love”

(M Iqbal Kurniawan)

**“jalankanlah hidupmu yang indah,jangan pernah kau berkeluh
kesah”**

(David Bayu-Naif)

**“I cannot make you understand, i cannot make anyone
understand. What is happening inside me. I cannot even explain it
to myself”**

(Franz Kafka)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, serta sholawat dan salam yang selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan rasa sayang dan juga rasa syukur, Aku persembahkan karya ini sebagai tanda cinta dan terima kasih kepada:

KELUARGAKU TERCINTA

Bunda, Ayah, Dhito, dan Abin

Yang senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi, nasihat baik dari segi moral maupun material yang tiada hentinya. Terima kasih untuk segala hal terbaik yang selalu diusahakan kepadaku hingga aku dapat mencapai tahap ini. Semoga ini menjadi pembuka langkah kesuksesanku dalam memberikan kalian kebahagiaan.

Serta

Almamater Tercinta

Universitas Lampung, khususnya Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

SANWACANA

Puji syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas berkat, rahmat. Dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Pengembangan Desa Wisata di Sumber Agung Kota Bandar Lampung”**. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Pada proses menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, masukan, saran, bantuan, dorongan, serta kritik dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos, M.AP. Selaku dosen pembimbing utama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu, waktu, saran, masukan, serta bimbingan selama proses menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing kedua penulis. Terima kasih untuk semua ilmu, waktu, dan juga saran, serta bimbingan yang diberikan dalam masa perkuliahan hingga sampai di tahap menyelesaikan skripsi.
3. Ibu Rahayu Sulistiowati, S. Sos., M. Si. selaku dosen penguji skripsi penulis. Terima kasih untuk semua kritik, saran, serta masukan yang diberikan untuk menyelesaikan skripsi menjadi lebih baik.
4. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung atas semua ilmu yang diberikan selama perkuliahan kepada penulis.
6. Seluruh staff Jurusan Administrasi Negara yang telah membantu penulis dalam proses administrasi studi sejak menjadi mahasiswa baru hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh pihak Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung, POKDARWIS Sumber Agung, Restu Bumi Adventure, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar

Lampung yang telah membantu penulis dalam proses pengumpulan data penelitian untuk menyelesaikan skripsi penulis.

8. Untuk Keluargaku tercinta, Ayahku Bambang Hermawan dan Bundaku Kurniati tersayang, terima kasih telah menjadi orang tua terbaik untuk anak-anaknya. Terima kasih atas kasih sayang dan perjuangannya yang selalu mengusahakan yang terbaik agar anak-anaknya menjadi anak yang hebat. Doa terbaik selalu menyertai kalian Ayah dan Bunda tersayang. Untuk Ayahku tersayang terimakasih telah mendidik anak anaknya menjadi lelaki yang bertanggung jawab. Untuk Bundaku tercinta terimakasih atas pembelajaran kepada kami bagaimana dunia bekerja.
9. Kepada Dhito dan Abin, terima kasih atas dukungan serta menjadi penyemangat penulis menulis skripsi dan selalu menjadi tempat penulis berkeluh kesah serta selalu mau direpotkan urusan sekolah adiknya hingga saat ini.
10. Kepada LBA, Jeas, Adiel, Rafi, Baba, Roni, Toni, Zai, Farhan, Bona, dan Zilal teman kecil yang selalu mendukung dan menghabiskan waktu untuk bercerita selalu bersama kalian, yang telah membantu jalannya proses kehidupan saya.
11. Kepada Magang Bapenda Jaya, Irza, Alkaisar, Anjes, Rara, Sasa, dan Dinda, terima kasih sudah selalu bersedia menemani sekaligus menjadi tempat berbagi cerita dan menjadi hiburan penulis dengan celetukannya serta saling menguatkan satu sama lain.
12. Kepada Syeva, Caya, Anjelita dan Alpi terima kasih sudah selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan dukungan untuk penulis menyelesaikan perkuliahan ini dengan keseruan cerita dibalikinya.
13. Kepada Rafi i, Fattah, Caya, Syeva, Irza, dan Radio AndalasFm telah memberikan bantuan laptop untuk penulis menulis skripsi ini, tanpa kalian akan sangat sulit untuk mengerjakan skripsi ini.
14. Kepada Raihan, Riki, Rizki, Yanuar, Abim, Dika, Rafi, Valdo, Arsyah, Jumadi dan teman-teman yang lainnya, terima kasih untuk celetukannya dan candaan yang selalu sama sejak awal kuliah hingga saat ini yang cukup menghibur penulis.

15. Kepada teman-teman ADAMANTIA, terima kasih untuk setiap momen suka dan dukanya dan selalu saling membantu satu sama lain selama proses perkuliahan ini.
16. Kepada Distrik Negara, untuk angkatan 2022-2024 yang telah menemani hari hari penulis di Fisip dengan becanda dan ceritanya di setiap harinya di kampus.
17. Kepada teman teman emang, terimakasih sudah mewarnai kehidupan kampus di Unila selama empat tahun terakhir dan memberikan semangat terus menerus.
18. Kepada IMKOBAL 23 terimakasih telah memberikan dampak pada proses kehidupan serta pembelajaran diri dalam berproses sebagai Duta Wisata.
19. Kepada Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung terkhusus Mba Eva, Kak Dunia Indra, Kak Billy, dan kiyay atu IMKOBAL terima kasih untuk pembelajaran serta pengalamannya yang diberikan kepada penulis dan juga menjadi salah satu bagian dari cerita proses perkuliahan penulis.
20. Terimakasih kepada NAIF yang telah menciptakan karya luar biasa untuk menemani penulis dalam mengerjakan skripsi selama satu tahun ini, dengan lagi lagunya yang menjadi penyemangat.
21. Serta kepada semua pihak yang belum sempat penulis sebut namanya yang sudah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
22. Dan terakhir, kepada diri saya sendiri Muhammad Iqbal Kurniawan. Terimakasih telah membuktikan bahwa ditengah kesibukannya masih bisa melakukan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan, terimakasih telah menjadi pribadi yang lebih baik di tahun terakhir menjadi mahasiswa, terimakasih untuk diri saya sendiri karena dengan banyak pengalamannya sudah merasakan bagaimana cara nya bertarung dengan kehidupan. Terima kasih, Iqbal.

Bandar Lampung, 11 Desember 2024
Penulis,

M. Iqbal Kurniawan

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Pengertian Kebijakan Publik	11
2.3 Implementasi Kebijakan.....	14
2.4 Pengertian Pariwisata.....	22
2.4.1 Komponen Pariwisata	24
2.4.2 Sarana dan Prasarana Pariwisata.....	26
2.4.3 Infrastruktur Pariwisata	27
2.4.4 Infrastruktur Jalan	28
2.4.5 Fasilitas Pariwisata.....	29
2.5 Model Pengembangan Desa Wisata	31
2.6 Kerangka Pikir.....	34
III. METODE PENELITIAN	35
3.1 Tipe Penelitian	35
3.2 Fokus Penelitian.....	35
3.3 Lokasi Penelitian	37
3.4 Sumber Data	37
3.5 Instrumen Penelitian.....	38
3.6 Teknik Pengumpulan Data	38
3.7 Teknik Analisis Data	40
3.8 Teknik Keabsahan Data.....	42
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	44

4.1	Gambaran Umum	44
4.1.1	Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung.....	44
4.1.2	Gambaran Umum Tentang Desa Wisata.....	50
4.2	Hasil Penelitian.....	52
4.2.1	Proses Implementasi Program Pengembangan Desa Wisata pada Sumber Agung	52
4.2.2	Lingkungan Kebijakan dalam Program Pengembangan Desa Wisata di Sumber Agung	82
4.3	Hasil Penelitian.....	92
4.3.1	Kepentingan Yang Mempengaruhi Pada Program Pengembangan Desa Wisata di Sumber Agung	92
4.3.2	Manfaat Yang di Hasilkan oleh Program Pengembangan Desa Wisata di Sumber Agung	97
4.3.3	Perubahan Besar Yang Terjadi di Desa Sumber Agung Sebagai Penetapan Desa Wisata	101
4.3.4	Pengambilan Keputusan Pada Pelaksanaan Program Pengembangan Desa Wisata di Sumber Agung	104
4.3.5	Pelaksanaan Pada Program Pengembangan Desa Wisata di Sumber Agung.....	109
4.3.6	Sumber Daya yang Dilibatkan Pada Pelaksanaan Program Pengembangan Desa Wisata di Sumber Agung.....	113
4.3.7	Kepentingan Lembaga Yang Terlibat Pada Program Pengembangan Desa Wisata di Sumber Agung	118
4.3.8	Karakteristik Lembaga Yang Terlibat Pada Program Pengembangan Desa Wisata di Sumber Agung	125
4.3.9	Kesesuaian Program Yang Dihasilkan Pada Program Pengembangan Desa Wisata di Sumber Agung	130
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	133
5.1	Kesimpulan.....	133
5.2	Saran.....	136
	DAFTAR PUSTAKA.....	139
	LAMPIRAN.....	143

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Data Daerah Tujuan Wisata (DTW) pada tahun 2019.....	2
Tabel 2. Penelitian Terdahulu	9
Tabel 3. Pengertian Komponen Pariwisata menurut para ahli.....	25
Tabel 4. Data Informan	39
Tabel 5. Dokumentasi	40
Tabel 6. Kepentingan yang mempengaruhi	95
Tabel 7. Manfaat yang dihasilkan	100
Tabel 8. Perubahan besar	102
Tabel 9. Pengambilan Keputusan.....	107
Tabel 10. Pelaksanaan program	111
Tabel 11. Sumberdaya Yang dilibatkan	116
Tabel 12. Kepentingan pihak	123
Tabel 13. Karakteristik pihak yang terlibat.....	129

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	34
2. Teknik analisis menurut Miles and Hubberman	42
3. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung	46
4. Objek Wisata Pada Desa Sumber Agung	51
5. Lembaga swasta yang membantu jalannya program pengembangan desa wisata.....	55
6. Kegiatan Treking Bersama Tour Guide	58
7. Kegiatan Pengolahan Gula Aren oleh Masyarakat	60
8. Penambahan paket camping di Desa Wisata Sumber Agung	63
9. Keputusan SK Walikota Bandar Lampung	67
10. Pengelolaan Hutan Kemiri	71
11. Pelatihan Tour Guide	75
12. Wisata Alam pada Desa Sumber Agung (Trailing Hiking Wisaata Batu Putuk dan Air Terjun Batu Putuk).....	77
13. Koordinasi Pembinaan Desa Wisata	83

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan potensi pariwisata terbesar di dunia. Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki keanekaragaman alam, budaya, dan sejarah yang sangat kaya. Potensi ini menjadi salah satu kekuatan utama Indonesia dalam menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Sektor pariwisata di Indonesia memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pariwisata tidak hanya menjadi salah satu sumber devisa utama negara, tetapi juga membuka lapangan kerja dan mendorong pengembangan infrastruktur di berbagai daerah. Provinsi Lampung memiliki potensi wisata yang sangat beragam dan menarik untuk dieksplorasi. Terletak di ujung selatan Pulau Sumatra, Lampung menawarkan pesona alam yang memukau. provinsi ini dikenal dengan pantainya yang menawan, seperti Pantai Tanjung Setia yang terkenal dengan ombaknya yang ideal untuk surfing, serta Pantai Krui yang menawarkan pemandangan tropis yang mempesona. Lampung juga memiliki destinasi wisata alam lainnya, seperti Taman Nasional Way Kambas yang menjadi rumah bagi konservasi gajah Sumatra, dan Gunung Anak Krakatau, salah satu gunung berapi yang paling terkenal di dunia. Tidak hanya alam, Lampung juga kaya akan kebudayaan, dengan berbagai festival dan tradisi lokal yang menarik, serta kuliner khas yang menggugah selera. Semua ini menjadikan Lampung sebagai tujuan wisata yang terus berkembang, menawarkan berbagai pengalaman bagi para wisatawan yang mencari petualangan, relaksasi, dan pengetahuan budaya.

Lampung sebagai provinsi yang memiliki potensi pariwisata yang cukup besar dan memiliki ragam budaya serta objek pariwisata yang terletak di berbagai kabupaten dan kota. Kondisi objek pariwisata yang saling berdekatan menciptakan perjalanan wisata menjadi menarik dan lebih bervariasi karena banyak tempat yang bisa dikunjungi sebagai Daerah tujuan pariwisata. Destinasi

Tujuan Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Pengertian umum dari daerah tujuan wisata adalah sebuah tempat dan atau kawasan yang dapat memenuhi permintaan dan keinginan wisatawan untuk tinggal berkunjung. Jadi, bisa disimpulkan bahwa daerah tujuan wisata merupakan tempat dimana segala kegiatan pariwisata bisa dilakukan dengan tersedianya segala fasilitas dan atraksi wisata untuk wisatawan. Seperti pada tabel dibawah ini menunjukkan data wisatawan baik domestik dan mancanegara di Provinsi Lampung.

Tabel 1. Data Daerah Tujuan Wisata (DTW) pada tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Wisatawan Domestik	Wisatawan Mancanegara	Jumlah	Persentase
1.	Kota Bandar Lampung	2.096.564	30.152	2.126.716	20%
2.	Kota Metro	581.008	5.381	586.389	6%
3.	Kab. Lampung Selatan	451.831	22.893	474.723	5%
4.	Kab. Lampung Timur	998.348	23.561	1.021.909	10%
5.	Kab. Lampung Tengah	314.583	4.487	319.070	3%
6.	Kab. Lampung Utara	190.930	554	191.484	2%
7.	Kab. Lampung Barat	818.554	22.312	840.866	8%
8.	Kab. Pesawaran	999.811	42.347	1.042.158	10%
9.	Kab. Pringsewu	367.125	925	368.050	4%
10.	Kab. Mesuji	122.342	12	122.354	1%
11.	Kab. Way Kanan	681.123	1.584	682.707	7%
12.	Kab. Pesisir Barat	834.118	117.885	952.003	9%
13.	Kab. Tanggamus	1.345.784	23.752	1.369.536	13%
14.	Kab. Tulang Bawang	223.367	793	224.160	2%
15.	Kab. Tulang Bawang Barat	117.667	841	118.058	1%
Jumlah (Total)				10.440.633	100%

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, 2020

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang telah ditetapkan sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW) ke-18. Pada tabel diatas dapat dilihat Kota Bandar Lampung memiliki jumlah wisatawan baik domestik dan mancanegara, disusul oleh Kabupaten Tanggamus dalam jumlah wisatawan gabungan terbanyak serta Kabupaten Lampung Timur di urutan ketiga dalam jumlah

wisatawan yang datang. Data diatas merupakan data wistawan baik domestik dan mancanegara yang diterbitkan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung pada tahun 2020. Banyak faktor yang menyebabkan banyaknya wistawan baik Domestik dan Mancanegara mengunjungi beberapa daerah di Lampung, Kota Bandar Lampung sebagai gerbang pulau sumatera menjadikan banyak wisatawan yang berkunjung ke Bandar Lampung, baik pusat aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. Bandar Lampung menjadi destinasi wisata untuk beberapa wisatawan. Kabupaten Tanggamus yang memiliki keindahan Gunung Tanggamus serta pantai-pantai tersembunyinya. Dan Kabupaten Lampung Timur yang memiliki Taman Nasional Konservasi Way Kambas yang menjadi destinasi favorit baik wisatawan domestik dan mancanegara, untuk melihat secara langsung perkembangan habitat gajah asli Lampung.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2011 mengenai Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional, Indonesia memiliki Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional dan Kawasan strategis pariwisata nasional yang tersebar di seluruh Indonesia. Bandar Lampung sebagai ibukota dari provinsi Lampung menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Pada tahun 2019 Kota Bandar Lampung merupakan daerah di Provinsi Lampung dengan kunjungan wisatawan terbanyak. Kunjungan wisatawan di Kota Bandar Lampung berjumlah 2.126.716 jiwa atau 20% dari jumlah total kunjungan wisatawan di Provinsi Lampung. Angka ini menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung menjadi salah satu daerah tujuan wisata (DTW) yang diminati. Kota Bandar Lampung sesuai dengan kebijaksanaan yang ditempuh dalam bidang kepariwisataan menyediakan sarana dan prasarana.

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kepariwisata, Pasal 7 Ayat 2 disebutkan bahwa kawasan strategi pengembangan Bandar Lampung dibagi dalam 5 (lima) zona kawasan wisata yang terdiri dari zona wisata alam, zona wisata bahari, zona wisata belana, zona wisata hiburan dan zona wisata budaya. Kemudian, berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Kota

Bandar Lampung Tahun 2022-2025, disebutkan bahwa kawasan pariwisata ditetapkan seluas \pm 188 hektar meliputi Kecamatan Teluk Betung Timur, Kecamatan Tanjung Barat, Kecamatan Teluk Betung Barat, dan Kecamatan Kemiling. Kecamatan Kemiling menjadi salah satu wilayah yang termasuk dalam pengembangan pariwisata di Kota Bandar Lampung. Hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang menyatakan bahwa Kecamatan Kemiling merupakan wilayah perencanaan kawasan pariwisata.

Salah satu potensi yang dimiliki Kota Bandar Lampung adalah Desa Wisata. Desa wisata merupakan salah satu bentuk penerapan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Muliawan (2008) menjelaskan bahwa desa wisata adalah desa yang memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas, baik berupa karakter fisik lingkungan alam perdesaan maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatan yang dikelola dan dikemas secara menarik dan alami dengan pengembangan fasilitas pendukung wisatanya, dalam suatu tata lingkungan yang harmonis dan pengelolaan yang baik dan terencana sehingga siap untuk menerima dan menggerakkan kunjungan wisatawan ke desa tersebut, serta mampu menggerakkan aktivitas ekonomi pariwisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Desa wisata merupakan salah satu pariwisata alternatif yang dapat dikembangkan pada era sekarang ini. Desa wisata menjadi relevan dengan terjadinya pergeseran model pembangunan pariwisata yang menitikberatkan pada aspek sosial, ekologis, dan pariwisata berbasis masyarakat.

Program Pengembangan desa wisata Sandiaga Uno dalam “Bimtek & *Workshop Online* Anugrah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021 untuk wilayah V” mengatakan bahwa, program desa wisata ini dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya baik dalam sektor pariwisata maupun ekonomi kreatif dan memiliki manfaat ekonomi yang berkeadilan dan dapat dirasakan. Anugrah Desa Wisata Indonesia (ADWI) merupakan salah satu program unggulan penggerak kebangkitan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan pariwisata Indonesia yang sedang digalakkan oleh

Kemenparekraf untuk kedua kalinya. Pertumbuhan dan bertambahnya desa wisata dari tahun ke tahun semakin meningkat, yaitu Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) pada tahun 2021 diikuti sebanyak 1.831 desa wisata yang mendaftar. Sedangkan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) pada tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu diikuti 3.419 desa wisata yang mendaftar di seluruh penjuru Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Permenparekraf) yang berkaitan dengan destinasi wisata adalah Permenparekraf No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. kategori yang dinilai dalam mendaftarkan sebuah Desa Wisata berdasarkan Anugerah Desa Wisata Indonesia yaitu pertama, daya tarik desa wisata berupa atraksi pariwisata dan ekonomi kreatif desa wisata, kedua yaitu kesiapan fasilitas dan pelayanan kepada wisatawan, ketiga yaitu digitalisasi dalam pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan wisata dan promosi desa wisata, keempat yaitu sumber daya manusia dan kelembagaan dalam memperdayakan warga desa dalam berwisata.

Pengembangan desa wisata di Bandar Lampung termasuk ke dalam salah satu program kerja di Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung yaitu Program Pengembangan Desa Wisata. Program ini telah berjalan dari tahun 2020 sampai dengan saat ini. Program Pengembangan Desa Wisata menampilkan beberapa kegiatan salah satunya Pengembangan Desa Wisata. Tujuan program pengembangan Desa Wisata ini adalah dapat mendaftarkan Desa Wisata di Bandar Lampung agar dapat masuk ke dalam jajaran Anugerah Desa Wisata Indonesia. Desa wisata di Bandar Lampung sendiri belum masuk ke dalam nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI). Dikarenakan masih banyak kekurangan baik dari fasilitas sampai kurangnya kepedulian masyarakat desa. Kelurahan Sumber Agung ditetapkan sebagai desa wisata berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 575/III/HK/2020 tentang Penetapan Desa Wisata yang menyatakan bahwa kawasan Pulau Pasaran, Sumber Agung (Tahura Wan Abdul Rachman), dan Sumur Putri mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai desa wisata. Desa Wisata Sumber Agung memiliki potensi wisata yang dikelola langsung oleh masyarakat lokal. Sebelum ditetapkan menjadi desa wisata, masyarakat

Sumber Agung mulai menyadari potensi wisata yang dapat dikembangkan sehingga pada tahun 2015 masyarakat membentuk suatu komunitas yaitu Kelompok Sadar Wisata atau yang disebut POKDARWIS, yang kemudian ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung Nomor 800/46/II.20/2020. Konsep desa wisata dengan pemberdayaan masyarakat dan untuk mencapai tujuan *United Nations Sustainable Development Goals* ini berkesinambungan dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025 Pasal 2 Nomor 8 yaitu arah pembangunan kepariwisataan yang berkualitas, berbasis masyarakat dan berkelanjutan serta pembangunan kepariwisataan daerah yang berorientasi pada pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian budaya dan lingkungan.

Potensi Desa Sumber Agung untuk menjadikan beberapa kawasan menjadi kawasan wisata, tentu saja masih adanya beberapa kekurangan yang menjadi sebuah hambatan dalam pengembangan desa wisata. Kurangnya kesiapan dan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata. Tujuan dari Program Pengembangan Desa Wisata di Bandar Lampung adalah memenuhi syarat untuk mendaftarkan ketiga Desa Wisata di Bandar Lampung salah satunya ialah Desa Wisata Sumber Agung. Potensi yang dimiliki baik dari segi keindahan dan mobilitas yang cukup dekat dengan pusat kota, sudah seharusnya Desa Wisata Sumber Agung mampu bersaing ke ranah Nasional yaitu Anugerah Desa Wisata Indonesia, selain akan mendapat perhatian lebih oleh masyarakat, beberapa persyaratan untuk mendapatkan Anugerah Desa Wisata Indonesia masih kurang. Setelah peneliti melakukan Pra-riset masih banyak yang harus dilakukan Desa Wisata Sumber Agung untuk berbenah, baik secara digitalisasi Desa Wisata Sumber Agung belum memenuhi persyaratan, lalu pemberdayaan masyarakat yang masih minim berkontribusi dalam mengembangkan desa wisata padahal desa wisata seharusnya berbasis masyarakat, fasilitas dan sarana prasarana yang kurang memadai menjadi salah satu persyaratan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) kurang maksimal secara pengembangan desa wisata, lalu kurangnya paket wisata yang ditawarkan seperti paket menuju Desa Wisata tanpa *treking* dinilai kurang oleh pengunjung, karena infrastruktur

baik jalan raya yang berlubang di beberapa titik, serta tidak adanya transportasi umum daerah Desa Sumber Agung

Infrastruktur yang paling terkait dan mempengaruhi pariwisata adalah infrastruktur transportasi. Infrastruktur dasar yang dianggap penting untuk mendukung keberlangsungan kegiatan pengembangan pariwisata adalah penyediaan infrastruktur transportasi yang memadai. Infrastruktur transportasi yang dimaksud bukan hanya berupa jalan raya tetapi berbagai sarana prasarana lainnya yang masih terkait dengan transportasi misalnya lahan parkir, modal transportasi serta berbagai sarana prasarana lainnya. Akses jalan menuju Kelurahan Sumber Agung mudah dijangkau dan memiliki kondisi yang baik. Namun, terdapat beberapa titik jalan menuju Desa Wisata yang kondisinya buruk (berlubang). Permasalahan infrastruktur di Desa Wisata Sumber Agung membuat para pengunjung enggan untuk datang Kembali lagi. Permasalahan infratraktur jalan raya yang sulit diakses untuk menuju ke salah satu Destinasi. Wisata membuat para pengunjung enggan untuk berpergian kesana, seperti membawa kendaraan pribadi, padahal banyak sekali wisatawan yang ingin berdatangan ke Desa Wisata Sumber Agung. Berdasarkan pengamatan peneliti terkait permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Program Pengembangan Desa Wisata di Kelurahan Sumber Agung.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, dirumuskan permasalahan pada penelitian, yakni :

1. Bagaimanakah Implementasi Program Pengembangan Desa Wisata di Sumber Agung?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam Pengembangan desa wisata Sumber Agung terkait Infrastruktur Pariwisata?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan yakni :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara mendalam mengenai pelaksanaan Program Pengembangan Desa Wisata di Sumber Agung.
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat Program Pengembangan Desa Wisata di Sumber Agung dalam rangka mengembangkan Pariwisata Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis serta praktis, yakni:

1. Secara Teoritis, bagi penulis penelitian ini menjadi pendalaman ilmu yang telah didapatkan pada perkuliahan sehingga mampu menganalisa program yang menjadi kajian administrasi negara serta dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan informasi khususnya bagi penulis serta segala pihak pada umumnya yang tentunya berkaitan dengan Program Pengembangan Desa Wisata di Sumber Agung.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan saran dan masukan bagi Masyarakat Desa Wisata di Kota Bandar Lampung dan Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung yang bertujuan untuk meningkatkan Pariwisata di Kota Bandar Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti merujuk pada tinjauan penelitian sebelumnya yang terkait dengan tema penelitian yang sedang dijalankan. Tinjauan penelitian ini dijadikan sebagai panduan untuk memperkaya kerangka teoretis yang diterapkan dalam penelitian ini. Materi sebelumnya berfungsi sebagai referensi yang membantu peneliti untuk memberikan klarifikasi mengenai perbedaan dan kesamaan dalam objek penelitian yang sebelumnya telah diselidiki, terutama terkait penerapan program. Hal ini membuat peneliti untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan yang muncul dari penelitian terdahulu. Penelitian ini akan memberikan pembaruan terkait dengan objek kajian pada penerapan program Program Pengembangan Desa Wisata di Sumber Agung. Penelitian terdahulu juga dapat digunakan sebagai data pendukung yang relevan.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

Nama peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
(Firmansyah dan Azhar, 2023)	Implementasi Program Pengembangan Desa Wisata Di Desa Kesugihan Kidul Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap	Berdasarkan hasil penelitian peneliti yang dianalisis dengan menggunakan 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program yang dikemukakan oleh George Edwards III. Hasil penelitian ini menunjukkan dari keempat indikator tersebut, terjadi pola komunikasi yang efektif informasi yang tersampaikan kepada masyarakat dilakukan dengan jelas, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dari aparatur pemerintahan desa, BUMDES, dan POKDARWIS dianggap mencukupi untuk merancang dan mendesain program. Sarana dan prasarana penunjang objek wisata dirancang dengan baik dan pembangunannya diserahkan kepada pihak pembangun. Terdapat komitmen yang kuat dari pelaksana program terhadap arahan kepala desa.

Nama peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
(Tommi, 2021)	Implementasi Program Wisata Dalam Meningkatkan Asli Pendapatan Desa Asli Marente Kecamatan Alas Sumbawa Tahun 2020 (Studi Kasus Di Desa Marente Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Tahun 2020).	Berdasarkan hasil penelitian peneliti menggunakan teori edwards iii implementasi kebijakan memiliki empat variabel dan hasil peneliti tentang implementasi program wisata dalam meningkat pendapatan asli desa belum berjalan dengan baik. Pada birokrasi pemerintah yang kerap kali disepelekan dan hal ini membuat pengembangan objek wisata bendungan kurang berkembang. Harus adanya kerjasama antara pengelola kebijaksanaan (<i>stakeholder</i>) dan pelaksana kebijakan serta pengawas kebijakan agar mencapai tujuan yang diharapkan.
(Anggraini dan Astari, 2020)	Implementasi program wisata sungai di kawasan pasar sekanak palembang.	Berdasarkan hasil penelitian peneliti menggunakan teori george r. terry, (1958). yaitu <i>planning</i> (perencanaan), <i>organizing</i> (pengorganisasian), <i>actuating</i> (pelaksanaan) dan <i>controlling</i> (pengawasan). dinas pariwisata kurang berpartisipasi aktif dalam memberikani ide-ide dalam pengembangan destinasi wisata faktor penghambat adanya <i>overlapping job</i> dikarenakan ketidakkejelasan dalam pembagian tugas yang mengakibatkan menurunnya semangat kerja. Kurangnya anggaran untuk sosialisasi dan penyuluhan mengenai program wisata sungai.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dideskripsikan, penelitian terkait Implementasi Program Pengembangan Desa Wisata di Sumber Agung yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki beberapa persamaan dengan penelitian terdahulu, yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan fokus penelitian yaitu mengenai Implementasi Program Pengembangan Desa Wisata. Sedangkan perbedaan penelitian peneliti dengan beberapa penelitian yang terdahulu adalah pada lokasi penelitian, dimana lokasi penelitian dilakukan di Desa Sumber Agung Kota Bandar Lampung. Fokus penelitian sebelumnya dan penelitian terdahulu ini berbeda, dimana fokus penelitian ini menggunakan teori milik Merilee S. Grindle.

2.2 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah, yang memiliki tujuan tertentu dalam kepentingan seluruh masyarakat. Sebagai produk perundang-undangan, kebijakan publik seharusnya relevan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan publik meliputi suatu proses memilih dan memilah berbagai alternatif terbaik untuk memecahkan masalah tertentu dalam masyarakat. Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Sebagaimana dikutip dari Agustino (2008) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Menurut Pressman dan Widavsky dalam Winarno (2002) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Woll dalam

Tangkilisan (2003) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.

Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Kemudian, kebijakan publik sebagai hipotesis adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku. Semakin banyak alternatif semakin baik dalam kebijakan publik. Hal ini bertujuan untuk mengukur seberapa baik dan berkualitas kebijakan yang akan diambil. Tentunya, pilihan kebijakan publik hampir dipastikan dapat dilaksanakan dengan baik, karena pilihan alternatif itu meliputi aspek keterlaksanaannya kebijakan dengan baik atau tidak, indikator keberhasilan kebijakan juga dapat diukur dengan berbagai pertimbangan dan pilihan lainnya. Dapat dipastikan bahwa pilihan kebijakan yang diputuskan sudah diukur secara baik dan matang. Dengan demikian kebijakan publik sangat berkait dengan administrasi negara ketika publik aktor mengkoordinasi seluruh kegiatan berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik/umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Untuk itu diperlukan suatu administrasi yang dikenal dengan “administrasi Negara.”

Menurut Nigro dan Nigro dalam Islamy (2001) administrasi negara mempunyai peranan penting dalam merumuskan kebijakan negara dan ini merupakan bagian dari proses politik. Dalam melaksanakan kebijakan publik, diperlukannya tahapan tahapan yang harus dilakukan sebagai sebuah kebijakan publik. Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn (1995) adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik yang dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam agenda pemerintah. Penyusunan agenda kebijakan sebagaimana dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga peran *stakeholder*.
2. Formulasi Kebijakan, masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan, kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan. Dalam tahap perumusan kebijakan, tiap-tiap alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.
3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan, legitimasi bertujuan memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga Negara akan mengikuti arahan pemerintah. Akan tetapi, warga Negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah adalah sah. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi cadangan dari sikap baik dari niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota menoleransi pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Dengan proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.
4. Penilaian/Evaluasi Kebijakan, secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak (Budi Winanrno, 2008). Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu

kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi juga dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan dapat meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, dan tahap dampak kebijakan.

2.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi prinsipnya merupakan suatu cara agar sebuah kebijakan yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuannya, Webster (Widodo, 2001) dijelaskan secara singkat bahwa implementasi kebijakan adalah menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan sehingga dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu tertentu. Dalam analisa kebijakan Dye dan Jonnes (1971) mengatakan bahwa implementasi adalah pelaksana suatu kegiatan setelah disahkan oleh pihak-pihak berkepentingan yang terorganisir dari agen-agen eksekutif. Implementasi kebijakan adalah suatu pelaksana kegiatan dengan mengikuti beberapa langkah yang ditetapkan terdahulu dalam kebijakan untuk mencapai tujuan (Sebatier dan Mazmania, 1986); Van Meter dan Van Horn (1975) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta baik secara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dirumuskan dalam kebijakan Implementasi.

Menurut Edwards III (1980) dipandang sebagai salah satu tahapan dalam proses kebijakan yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau implikasi (*Output, Outcome*) yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan itu. Menurut Ripley dan Franklin (Kolo, 2005), mengemukakan bahwa proses implementasi kebijakan tidak lain mencakup pekerjaan dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan setelah undang-undang ditetapkan, dan aktivitas-aktivitas tersebut berhubungan dengan upaya mentransformasikan atau menterjemahkan pernyataan-pernyataan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan kedalam program dan tindakan konkrit, membentuk staf organisasi yang bertugas memberikan manfaat dan pelayanan terhadap kelompok sasaran serta memobilisasi sumber daya yang

dibutuhkan dalam pencapaian tujuan. Sedangkan menurut Jones dalam Rohman (2009) menyebutkan bahwa program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan.

Menurut Merilee S. Grindle (1980): “Keberhasilan implementasi kebijakan atau program dapat diukur berdasarkan proses (perspektif proses) dan hasil yang dicapai (perspektif hasil)”. *“is a political and administrative procces”*. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika dalam pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara:

1. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika dalam pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain :
 - 1) Tata cara pelaksanaan: berupa serangkaian susunan kegiatan dalam melaksanakan suatu program yang dibuat.
 - 2) Agen pelaksana: sebagai penyedia dan pelaksana dari program tersebut.
 - 3) Kelompok sasaran: penerimaan kelompok sasaran terhadap program yang akan dilaksanakan.
 - 4) Sedangkan pada perspektif hasil, program dinilai berhasil manakala programnya membawa dampak seperti yang diinginkan.
2. Suatu program dapat berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya. Dengan kata lain, implementasi program dapat dikatakan berhasil apabila telah nampak konsistensi antara proses yang dilalui dengan hasil yang dicapai. Adapun alasan peneliti menggunakan teori Merilee S. Grindle dalam penelitian ini dikarenakan konteks implementasi yang disampaikan oleh Merilee S. Grindle (1980) berorientasi pada pelaksanaan program, sehingga ada relevan untuk mengukur keberhasilan implementasi program berdasarkan perspektif proses serta perspektif hasil.

Jones dalam Arif Rohman (2009) menyebutkan program merupakan salah

satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Menurut Charles O. Jones ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu :

1. Pengorganisasian Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.
2. Interpretasi para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
3. Penerapan atau aplikasi perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

Selain itu model implementasi yang dapat di gunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle dalam buku Model Merilee S. Grindle (1980), model ini ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Dalam model implementasi kebijakan, Grindle (1980) menamakan modelnya "*Implementation as a Political and Administratif Process.*" Pada model ini, menunjukkan adanya keterkaitan antara tujuan kebijakan, program-program tindakan dan proyek-proyek individual telah tersusun dan dibiayai, aktivitas-aktivitas Pelaksanaan kebijakan, dan hasil dari kebijakan. Menurut Grindle (1980), faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan adalah "*content*" dan "*context*" dari kebijakan tersebut :

A. *Content* atau isi kebijakan, terdiri dari :

1. Kepentingan yang mempengaruhi (*Interest affected*)

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan sangat tergantung pada kepentingan-kepentingan yang ada pada kebijakan tersebut. Dalam hal ini, apakah kebijakan itu mewakili kepentingan orang-orang tertentu saja atau mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat luas. Suatu kebijakan akan berhasil apabila mendapat dukungan luas dari masyarakat sebagai

kelompok sasaran dari. Suatu kebijakan akan mendapat dukungan yang luas dari kelompok sasarannya kalau kebijakan tersebut mewakili kepentingan-kepentingannya, demikian pula sebaliknya.

2. Tipe Manfaat (*Type of benefits*)

Keberhasilan suatu kebijakan kalau kebijakan tersebut memberikan manfaat yang banyak terhadap kelompok sasarannya dan kebijakan tersebut akan mendapat dukungan yang luas dari kelompok sasarannya. Hal ini juga terjadi sebaliknya, kalau suatu kebijakan hanya memberikan manfaat yang sedikit kepada kelompok sasarannya.

3. Kebijakan dengan perubahan besar (*Extent of change envisioned*)

Suatu kebijakan yang menginginkan perubahan yang besar, maka semakin sulit dalam implementasinya. Dalam hal ini, perubahan yang besar yang merupakan tujuan dari suatu kebijakan maka terdapat kesulitan dalam mencapai tujuannya.

4. Letak pengambilan keputusan (*Site of decision making*)

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan diimplementasikan sangat tergantung pada tempat pengambilan keputusan. Semakin jauh lokasi pengambilan keputusan, maka semakin besar kemungkinan implementasi kebijakan tidak berhasil dan demikian pula sebaliknya.

5. Pelaksanaan program (*Program implementors*)

Salah satu yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan adalah para pelaksananya. Implementor yang menjadi memiliki kemampuan dan komitmen yang kuat tentunya kebijakan tersebut berhasil.

6. Sumberdaya yang dilibatkan (*Resources committed*)

Ketersedian sumber-sumber daya pendukung implementasi kebijakan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan tersebut. Tentunya, kekurangan sumber-sumber daya pendukung akan menyulitkan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan.

B. *Context* atau lingkungan kebijakan terdiri dari :

1. Kepentingan lembaga *Power, interests, and strategies of actor involved*

Keberhasilan suatu kebijakan kalau aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut mempunyai kekuatan, kepentingan, dan strategi-

strategi dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

2. Karakteristik lembaga (*Institution and regime characteristics*)

Keberhasilan kebijakan akan ditentukan pula oleh dukungan institusi dan rezim yang berkuasa. Dukungan ini bervariasi tergantung dari karakteristik rezim berkuasa

3. Kesatuan program (*Compliance and responsiveness*)

Kebijakan akan berhasil apabila ada kesesuaian tujuan dan bentuk program. Hal yang sama pula kalau para implementor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan.

Keterkaitan konsep-konsep yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Grindle, Berdasarkan model proses implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle di bawah ini, terlihat keunggulan yang dimilikinya adalah kemampuannya mengidentifikasi dan menjelaskan bukan saja karakteristik birokrasi sebagai pelaksana, tetapi juga kekuasaan dan kelompok-kelompok kepentingan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan tersebut. Kelemahannya adalah ketidakjelasan mana variabel yang berpengaruh secara langsung dan variabel yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap hasil kebijakan.

Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III, menurut Edwards III dalam Agustino (2006) untuk mencapai suatu keberhasilan terhadap implementasi kebijakan publik, maka diperlukan empat faktor, yaitu:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.
4. Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari stuktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Model implementasi kebijakan dari Edward III ini dapat digunakan sebagai alat mencitra implementasi program atau kebijakan di berbagai tempat dan waktu. Artinya model dapat digunakan untuk mencitra fenomena implementasi kebijakan.

Setelah melihat model implementasi yang digunakan Grindle, dibutuhkan pendekatan implementasi pada penelitian ini, pendekatan dalam implementasi dibagi dua yaitu *Top Down* dan *Bottom Up*, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan *Top Down*

Pendekatan ini menggunakan logika berfikir dari atas lalu melakukan pemetaan kebawah untuk melihat keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan. Pendekatan ini juga sering kali disebut "*policy centered*" karena hanya fokus kepada kebijakan dan berusaha untuk memperoleh fakta-fakta apakah kebijakan tersebut ketika diimplementasikan mampu mencapai tujuan atau tidak (Hogwood dan Gunn, 1984). Secara garis besar, tahapan-tahapan kerja para peneliti

Generasi kedua yang menggunakan pendekatan *top-down* biasanya adalah sebagai berikut :

- 1) Memilih kebijakan yang akan dikaji;
- 2) Mempelajari dokumen kebijakan yang ada untuk dapat mengidentifikasi tujuan dan sasaran kebijakan yang secara formal tercantum dalam dokumen kebijakan;
- 3) Mengidentifikasi bentuk-bentuk keluaran kebijakan yang digunakan sebagai instrument untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan;
- 4) Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan telah diterima oleh kelompok sasaran dengan baik (sesuai dengan *Standard Operating Procedure* yang ada);
- 5) Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan tersebut memiliki manfaat bagi kelompok sasaran
- 6) Mengidentifikasi apakah muncul dampak setelah kelompok sasaran memanfaatkan keluaran kebijakan yang mereka terima. Analisis kemudian diarahkan untuk mengetahui apakah dampak yang muncul tersebut berimplikasi terhadap terwujudnya tujuan kebijakan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen kebijakan.

Dengan langkah-langkah kerja sebagaimana digambarkan, maka penelitian yang bersifat *top-down* lebih tepat dipakai untuk menilai efektifitas implementasi suatu kebijakan, yaitu untuk memastikan apakah tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dapat tercapai di lapangan atau tidak.

2. Pendekatan *Bottom Up*

Para peneliti Generasi kedua yang menggunakan pendekatan *top-down* telah memberikan banyak kontribusi terhadap upaya untuk memahami realitas implementasi kebijakan, akan tetapi beberapa peneliti Generasi kedua tidak terlalu puas dengan pendekatan *top-down* yang dianggap terlalu menyederhanakan masalah dan cenderung instrumentalis karena hanya menaruh perhatian terhadap efektifitas implementasi kebijakan. Pendekatan *bottom-up* ini dipelopori oleh beberapa peneliti Generasi kedua

seperti Elmore (1978,1979), Lipsky (1971), Berman (1978) dan Hjern, Hanf, serta Porter (1978) yang didasarkan atas ketidakpuasan mereka, kemudian mereka mengembangkan pendekatan baru yaitu *bottom-up*. menurut para *bottom-uppers* (sebutan para pendukung pendekatan *bottom-up*), implementasi akan berhasil apabila kelompok sasaran (*target group*) dilibatkan sejak awal dalam proses perumusan kebijakan sampai dengan implementasinya. Hal inilah yang kerap kali sering dilupakan para penganut aliran *top-down* (biasa disebut *top-downers*). Secara garis besar, tahapan-tahapan kerja para peneliti Generasi kedua yang menggunakan pendekatan *bottom-up* biasanya adalah dengan langkahlangkah sebagai berikut :

- 1) Memetakan aktor dan organisasi (*stakeholder*) yang terlibat dalam implementasi kebijakan pada level bawah;
- 2) Mempertanyakan para aktor tersebut tentang pemahaman mereka terhadap kebijakan yang mereka implementasikan dan apa kepentingan mereka terlibat dalam implementasi dalam bentuk pengumpulan informasi;
- 3) Memetakan keterkaitan (jaringan) para aktor pada level terbawah tersebut dengan aktor-aktor pada level diatasnya;
- 4) Peneliti mencoba memetakan pimpinan pada level yang lebih tinggi dengan mencari informasi yang sama
- 5) Peneliti melakukan pemetaan sampai kejenjang level tertinggi yaitu para pembuat kebijakan (*policy maker*)

Dengan pola penelitian sebagaimana digambarkan tersebut, tujuan dari penelitian implementasi dengan pendekatan yang berbeda dari top-down adalah agar pendekatan bottom-up ini mengetahui jaringan implementasi yang melibatkan para aktor dari berbagai level tersebut dan memetakan motif ekonomi-politik para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

2.4 Pengertian Pariwisata

Pengembangan pariwisata adalah meningkatkan objek wisata, meningkatkan mutu pelayanan, perluasan dan penganekaragaman objek wisata serta akomodasi lainnya. Jadi pengembangan pariwisata adalah upaya pemanfaatan potensi alam dan budaya, dengan memperhatikan aspek-aspek pelestarian. Robert Christie Mill mengemukakan pengembangan pariwisata harus memperhatikan empat hal berikut:

1. Analisa pasar, merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk mempelajari berbagai masalah pasar. Analisis pasar menyangkut lokasi pasar, luas pasar, sifat pasar, dan karakteristik pasar
2. Analisa teknik dan perencanaan, merupakan suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.
3. Analisa sosio-ekonomi, merupakan usaha untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai situasi sosial dengan menelaah kaitan-kaitan antar berbagai sub sistem dalam kehidupan masyarakat serta perekonomian lingkungan di sekitar.
4. Analisa bisnis dan hukum, merupakan tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu.

Selain itu pengembangan pariwisata sangat dibutuhkan di era sekarang melihat kemajuan teknologi sudah semakin berkembang menurut Page (2009), menyebutkan ada lima pendekatan dalam pengembangan pariwisata yaitu:

1. *Boostern approach*, yaitu pendekatan sederhana yang melihat pariwisata sebagai suatu akibat positif untuk suatu tempat dan penghuninya. Namun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan daya dukung wilayah tidak dipertimbangkan secara matang.

2. *The economic industry approach*, yaitu pendekatan pengembangan pariwisata yang tujuan ekonominya lebih didahulukan dari tujuan sosial dan lingkungan serta menjadikan pengalaman pengunjung dan tingkat kepuasan sebagai sasaran utama.
3. *The physical spatial approach*, pendekatan ini didasarkan pada tradisi penggunaan lahan geografis, strategi pengembangan berdasarkan perencanaan yang berbeda-beda melalui prinsip keruangan, spasial. Misalnya pengelompokan pengunjung di suatu kawasan dan pemecahan-pemecahan tersebut untuk menghindari terjadinya konflik. Pendekatan ini didasarkan pada tradisi “penggunaan lahan” geografis. Strategi pengembangannya berdasarkan perencanaan yang berbeda-beda melalui prinsip-prinsip keruangan (*spatial*). Misalnya pengelompokan pengunjung di satu kawasan dan pemecahan-pemecahan tersebut untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik. Hanya saja kekurangan dari pendekatan ini adalah kurang mempertimbangkan dampak sosial dan kultur dari pengembangan wisata.
4. *The community approach*, yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada pentingnya keterlibatan maksimal dari masyarakat setempat dalam proses pengembangan wisata. Pendekatan ini menganggap pentingnya suatu pedoman pengembangan pariwisata yang dapat diterima secara sosial (*socially acceptable*). Pendekatan yang dilakukan adalah menekankan pentingnya manfaat sosial dan kultural bagi masyarakat lokal secara bersama-sama termasuk didalamnya pertimbangan ekonomi dan lingkungan.
5. *Sustainable approach*, yaitu pendekatan berkelanjutan dan berkepentingan atas masa depan yang panjang serta atas sumber daya dan efek-efek pembangunan ekonomi pada lingkungan yang mungkin menyebabkan gangguan budaya dan sosial yang memantapkan pola-pola kehidupan dan gaya hidup individual. Dalam merencanakan pengembangan pariwisata suatu destinasi, perencana biasanya dihadapkan pada isu-isu yang menjadi tantangan pengembangan pariwisata. Karena itu, keempat pendekatan tersebut dapat menjadi acuan dalam memahami, menganalisis situasi berdasarkan prinsip atau acuan pendekatan tersebut. Selain keempat pendekatan tersebut, Hall dan Page (2006) menambahkan pentingnya

pendekatan perencanaan pariwisata yang berkelanjutan (*sustainable tourism planning*).

2.4.1 Komponen Pariwisata

Sebagai upaya mengembangkan sebuah pariwisata Cooper menyebutkan terdapat 4 (empat) komponen yang harus dimiliki oleh sebuah daya tarik wisata yaitu: (1) Pertama, atraksi (*attractions*), seperti alam yang menarik, kebudayaan daerah yang menawan dan seni pertunjukkan; (2) Kedua, aksesibilitas (*accessibilities*), seperti transportasi lokal dan adanya terminal; (3) Ketiga, amenitas atau fasilitas (*amenities*), seperti tersedianya akomodasi, rumah makan, dan agen perjalanan; (4) Keempat, *ancillary services* yaitu organisasi kepariwisataan yang dibutuhkan untuk pelayanan wisatawan seperti organisasi manajemen pemasaran wisata (Cooper, 2005). Kemudian Yoeti (2002) berpendapat bahwa berhasilnya suatu tempat wisata hingga tercapainya kawasan wisata sangat tergantung pada 3A yaitu atraksi (*attraction*), mudah dicapai (*accessibility*), dan fasilitas (*amenities*).

Selain itu pengembangan pariwisata yang dikemukakan Direktorat Jendral Pariwisata Republik Indonesia yang menyebutkan perkembangan produk wisata dikaitkan atas 4 faktor yaitu: (1) Pertama, *attractions* (daya tarik): *site attractions* (tempat-tempat bersejarah, tempat dengan iklim yang baik, pemandangan indah), *event attractions* (kejadian atau peristiwa misalnya kongres, pameran, atau peristiwa lainnya); (2) Kedua, *amenities* (fasilitas) tersedia fasilitas yaitu: tempat penginapan, restoran, transport lokal yang memungkinkan wisatawan berpergian, alat-alat komunikasi; (3) Ketiga, *accessibility* (aksesibilitas) adalah tempatnya tidak terlalu jauh, tersedia transportasi ke lokasi, murah, aman, dan nyaman; (4) Keempat, *tourist organization* untuk menyusun kerangka pengembangan pariwisata, mengatur industri pariwisata dan mempromosikan daerah sehingga dikenal banyak orang.

Berikut ini adalah beberapa Komponen Pariwisata menurut Para Ahli :

Tabel 3. Pengertian Komponen Pariwisata menurut para ahli

No	Nama	Tahun	Komponen	Indikator
1.	Cooper	2005	Atraksi	Alam yang menarik, Kebudayaan, Seni Pertunjukan
			Aksesibilitas	Transportasi Lokal
			Amenitas	Rumah makan, Akomodasi, Agen Perjalanan
			<i>Ancillary</i>	Organisasi Kepariwisataaan
2.	Yoeti	2002	<i>Attraction</i>	Ekonomi yang berkelanjutan
			<i>Accessibility</i>	Keberlanjutan ekologi
			<i>Amenities</i>	Akomodasi, Hotel, Transportasi
3.	Middleton	2001	<i>Attraction</i>	Bentang Alam, Iklim, Seni, Bahasa
			<i>Accessibility</i>	Infrastruktur Jalan, Bandara, Sarana Transportasi
			<i>Amenities</i>	Akomodasi, Hotel, Transportasi
4.	Gunn	2002	Atraksi	Tingkat Keunikan, Nilai Obyek, ketersediaan Lahan, Kondisi Fisik, Obyek Wisata
			Servis atau pelayanan	Pelayanan berupa fasilitas, restoran, rumah makan, agen perjalanan,serta toko yang menyajikan barang khas daerah
			promosi	kegiatan kehumasan, memberikan intentif, potongan tiket masuk
			transportasi	aksebilitas atau kemudahan untuk mencapai ke suatu lokasi daya tarik wisata
			informasi dan promosi	informasi perjalanan, peta, buku petunjuk, artikel majalah, brosur maupun internet
5.	Direktorat Jenderal Pariwisata Indoneisa	2004	<i>attraction</i>	Tempat bersejarah, pemandangan, pameran
			<i>Amenities</i>	Penginapan dan restoran
			<i>Accessibility</i>	Tempat transportasi
			<i>Tourist Organization</i>	Lembaga yang mengatur pariwisata
6.	Sugiyanto	2004	Daya Tarik Objek Wisata	Tingkat Keunikan, Nilai Obyek, ketersediaan Lahan, Kondisi Fisik, Obyek Wisata
			Aksesibilitas	Jarak dari jalan raya, kondisi jalan, kendaraan menuju obyek
			Amenitas	Fasilitas dasar (warung makan, MCK, dan akomodasi) dan Fasilitas Pendukung (listrik, tempat ibadah, Akses komunikasi, dan tempat parkir).

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

2.4.2 Sarana dan Prasarana Pariwisata

Sarana pariwisata sebagai ujung tombak usaha kepariwisataan dapat diartikan sebagai usaha yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada wisatawan pada suatu daerah tujuan wisata dimana keberadaannya sangat tergantung kepada adanya kegiatan perjalanan wisata. Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Sedangkan prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain sebagainya. Sarana pariwisata menurut Yoeti (2008) adalah segala sesuatu yang melengkapi dan bertujuan untuk memudahkan suatu proses kegiatan pariwisata agar dapat berjalan dengan baik dan lancar, sarana pariwisata dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Sarana Pokok

Yang termasuk kedalam kelompok ini terdiri dari *travel agent*, *tour operator*, angkutan wisata, rumah makan akomodasi objek wisata, dan atraksi wisata.

2. Sarana pelengkap kepariwisataan

Sarana pelengkap kepariwisataan ini yaitu merupakan suatu perusahaan atau tempat yang menyediakan fasilitas untuk berekreasi.

3. Sarana penunjang kepariwisataan

Sarana penunjang kepariwisataan ini merupakan suatu sarana pelengkap dan sarana pokok yang memiliki fungsi agar wisatawan tinggal lebih lama.

Prasarana Wisata menurut Suswanto (2004) adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mutlak dan dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanan di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan dan sebagainya. Yang termasuk prasarana diantaranya: aksesibilitas, utilitas dimana yang termasuk kedalam utilitas ini adalah listrik, air bersih, toilet, mushola dan lain sebagainya, lalu ada jaringan pelayanan yang didalamnya terdiri dari keamanan, pelayanan kesehatan dan lain

sebagainya.

Prasarana perlu disediakan dalam obyek wisata karena prasarana merupakan kebutuhan dasar (*basic needs*) dan prasarana dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan sektor pariwisata sangat terkait dan bergantung pada perkembangan infrastruktur yang tersedia. Peran infrastruktur menjadi sangat penting karena dengan pengembangan infrastruktur dan sistem infrastruktur yang tersedia dan akan dapat mendorong perkembangan sektor pariwisata.

2.4.3 Infrastruktur Pariwisata

Infrastruktur memiliki peranan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan jangka pendek menciptakan lapangan kerja sektor konstruksi dan jangka menengah dan panjang akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor terkait. Infrastruktur sepertinya menjadi jawaban dari kebutuhan negara-negara yang ingin mendorong pertumbuhan pariwisata, ekonomi, dengan membantu penanggulangan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, mendukung tumbuhnya pusat ekonomi, dan meningkatkan mobilitas barang dan jasa serta merendahkan biaya aktifitas investor dalam dan luar negeri.

Stone dalam Kodoatie (2005) menyatakan bahwa infrastruktur adalah fasilitas yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen publik untuk fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan sosial dan ekonomi. Pengertian infrastruktur menurut peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 38 tahun 2015, infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Pembangunan infrastruktur ditinjau dari aspek kepentingan masyarakat dapat meningkatkan transformasi informasi dan kemudahan akses yang menghubungkan antar wilayah, baik antar wilayah pemerintahan pedesaan, antar pemerintahan kecamatan bahkan kemudahan akses menuju Ibukota

Kabupaten. Mencermati betapa pentingnya infrastruktur dalam kehidupan masyarakat, disamping untuk meningkatkan akselerasi pembangunan maka cukup beralasan jika setiap wilayah dibangunnya infrastruktur yang memadai. Tentunya pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada visi dan misi pemerintahan, baik lembaga pemrintah pada level yang paling bawah hingga lembaga pemerintah paling atas. Hendaknya dilakukan secara terpadu tertib, aman, nyaman dan lancar sehingga hasil yang dicapai dapat memberikan nilai manfaat yang lebih besar pada masyarakat.

Infrastruktur pariwisata adalah infrastruktur yang sama dengan infrasruktur perekonomian pada umumnya karena kegiatan kepariwisataan merupakan salah satu kegiatan perekonomian. Ada tiga sarana kepariwisataan yang mempengaruhi lama tinggal wisatawan, yaitu (1) dasar utama kepariwisataan; (2) sarana korelatif kepariwisataan; (3) sarana penunjang kepariwisataan. Adanya Infrastruktur pariwisata bertujuan untuk memudahkan dan melancarkan aktivitas wisata, dan fasilitas pariwisata yang maksimal akan memberikan pengalaman dan kesan yang baik bagi wisatawan. Prasarana dan sarana kepariwisataan sesungguhnya merupakan kebutuhan wisatawan yang perlu disiapkan atau disediakan dalam mengembangkan industri pariwisata. Prasarana (infrastruktur) adalah semua fasilitas yang memungkinkan proses perekonomian dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya.

2.4.4 Infrastruktur Jalan

Meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi baik di wilayah desa hingga wilayah kota, infrastruktur jalan merupakan pilar menentukan kelancaran arus barang, jasa, manusia, uang dan informasi dari satu zona pasar ke zona pasar lainnya yang menyebabkan perputaran ekonomi makin pesat. Wahyuni (2009) apabila prasarana jalan rusak dan buruk alokasi sumber daya menjadi terhambat, pendistribusian faktor produksi, pembangunan industri, jasa dan barang pada akhirnya berpengaruh pada tingkat pendapatan. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, dari segi fungsinya jalan umum dibedakan

menjadi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, dan kecepatan rata-rata tinggi. Jalan kolektor dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, bahwa infrastruktur jalan mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jalan sebagai prasarana distribusi barang, jasa, dan manusia merupakan faktor yang penting dalam kehidupan, tanpa adanya akses jalan yang baik maka segala aktifitas manusia di berbagai bidang kehidupan akan terhambat. Jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 menjelaskan jalan berdasar peruntukannya terdiri atas jalan khusus dan jalan umum. Jalan umum dikelompokkan menurut sistem (primer dan sekunder), fungsi (arteri, kolektor dan lokal), status (nasional, provinsi dan kabupaten atau kota) dan kelas (diatur sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan). Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

2.4.5 Fasilitas Pariwisata

Fasilitas wisata ialah pelengkap daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk Memenuhi kebutuhan dari wisatawan yang sedang menikmati perjalanan wisata. Fasilitas wisata dibuat untuk mendukung konsep atraksi wisata yang sudah ada. Menurut Yoeti (Sulistiyana, 2015) fasilitas wisata adalah seluruh fasilitas yang memiliki fungsi untuk mencukupi keperluan wisatawan yang bekunjung atau sementara waktu tinggal di daerah tujuan wisata yang dikunjunginya, sehingga mereka dengan tenang menikmati dan terlibat dalam seluruh aktivitas di daerah tujuan wisata tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) fasilitas adalah sarana untuk pelancaran

pelaksanaan fungsi. Sehingga dengan tersedianya fasilitas yang memadai untuk kenyamanan wisatawan, hal ini tentu akan berpengaruh terhadap kesejahteraan pelaku usaha.

Wisatawan cenderung merasa nyaman apabila melakukan transaksi ekonomi dengan pelaku usaha apabila fasilitas yang disediakan pengelola memadai. Selain daya tarik wisata, kegiatan wisata yang dilakukan wisatawan membutuhkan adanya fasilitas wisata yang menunjang kegiatan wisata tersebut. Sehingga pada akhirnya setiap komponen saling berkaitan dalam rangkaian wisata perjalanan mulai dari daya tarik wisata, kegiatan wisata, sampai dengan fasilitas wisata merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Fasilitas wisata adalah salah satu hal yang memenuhi kebutuhan dari wisatawan yang melakukan perjalanan wisata. Sesampainya mereka di atraksi wisata. Komponen dari fasilitas perjalanan terdiri dari unsur alat transportasi, Fasilitas akomodasi, fasilitas makanan-minuman dan fasilitas yang lainnya sesuai Dengan kebutuhan perjalanan. Adapun Fasilitas terbagi sebagai berikut:

1. Akomodasi

Akomodasi diperlukan oleh wisatawan yang sedang berkunjung ke atraksi Wisata untuk tempat tinggal sementara sehingga dapat beristirahat sebelum melakukan kegiatan wisata selanjutnya. Dengan adanya akomodasi membuat wisatawan untuk tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Hal-hal yang berkaitan dengan akomodasi wisata sangat mempengaruhi wisatawan untuk berkunjung seperti pilihan akomodasi, jenis fasilitas dan pelayanan yang diberikan, tingkat harga, serta jumlah kamar yang tersedia.

2. Tempat makan dan minum

Tentu saja dalam melakukan kunjungan ke tempat wisata para wisatawan yang datang memerlukan makan dan minum sehingga perlu disediakan pelayan makanan dan minuman. Hal tersebut mengantisipasi bagi para wisatawan yang tidak membawa bekal saat melakukan perjalanan wisata. Makanan khas daerah wisata pun dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan

yang datang. Hal yang perlu dipertimbangkan yaitu jenis makanan dan minuman, kebersihan, pelayanan, harga, bahkan lokasi pun menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

3. Fasilitas umum

Fasilitas umum yang dimaksud adalah fasilitas penunjang tempat wisata seperti toilet umum, tempat parkir, musholla, dan sebagainya. Pembangunan fasilitas wisata di daerah tujuan wisata maupun objek wisata harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Fasilitas wisata secara kuantitatif menunjuk pada jumlah fasilitas wisata yang harus disediakan, dan secara kualitatif menunjukkan pada mutu pelayanan yang diberikan dan tercermin pada kepuasan wisatawan (Suwanto, 2004).

2.5 Model Pengembangan Desa Wisata

Desa wisata sebenarnya suatu bentuk pariwisata minat khusus yang dikemas secara komprehensif sehingga wisatawan dapat berinteraksi secara lengkap dengan alam, masyarakat sekitar termasuk juga budaya dan tradisi lokal didalamnya. Wisatawan juga dapat melihat, membeli, merasakan, dan belajar tentang nilai-nilai kearifan lokal yang masih sangat terasa denyutnya didalam kehidupan masyarakat diwilayah pedesaan seperti gotong-royong, upacara ritual adat, kesenian tradisional, kerajinan lokal. Fokus bagi pengembangan desa wisata yang ada di wilayah Indonesia yaitu program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pariwisata atau lebih populer disebut sebagai (Pemberdaayaan Nasional Masyarakat Mandiri) yang dicanangkan pada tahun 2009. Program pengembangan desa wisata bertujuan memotivasi masyarakat yang berada di desa untuk mengelola secara kreatif potensi alam dan budaya sebagai sumber pendapatan utama, tetapi juga menyiapkan masyarakat lokal dalam menghadapi besarnya persaingan global.

Desa wisata merupakan salah satu konsep pariwisata yang mengedepankan kearifan lokal sebagai daya tarik utama, dengan melibatkan masyarakat setempat secara aktif. Ada beberapa model desa wisata yang berkembang di Indonesia. Pertama, desa wisata berbasis alam yang memanfaatkan keindahan

dan kekayaan alam sebagai daya tarik utama. Desa ini biasanya terletak di kawasan pegunungan, pantai, hutan, atau dekat danau, dengan menawarkan aktivitas seperti trekking, snorkeling, berkemah, atau wisata kebun. Contohnya adalah Desa Penglipuran di Bali yang terkenal dengan lingkungan asri dan tata ruang tradisionalnya. Kedua, desa wisata berbasis budaya, yang mengangkat tradisi, seni, dan adat istiadat lokal. Desa ini menjadi tempat bagi wisatawan untuk menyaksikan tarian tradisional, upacara adat, atau kerajinan tangan khas, seperti Desa Wisata Sade di Lombok yang mempertahankan rumah adat dan kehidupan tradisional Suku Sasak. Selain itu, ada juga model desa wisata berbasis edukasi yang menawarkan pengalaman belajar kepada wisatawan, seperti pelatihan membatik, bertani, atau memasak makanan tradisional, dengan contoh Desa Wisata Pentingsari di Yogyakarta. Semua model ini bertujuan untuk mempromosikan potensi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya setempat. Desa wisata dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan daya tariknya, yaitu:

1. Desa wisata berbasis sumber daya alam

Daya tariknya berasal dari alam, seperti pegunungan, bukit, air terjun, danau, dan bentang alam lainnya.

2. Desa wisata berbasis budaya lokal

Daya tariknya berasal dari adat istiadat dan kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti mata pencaharian dan religi.

3. Desa wisata berbasis kreatif

Daya tariknya berasal dari aktivitas ekonomi kreatif, seperti kerajinan dan kesenian.

4. Desa wisata berbasis kombinasi

Daya tariknya berasal dari kombinasi sumber daya alam, budaya, dan ekonomi kreatif.

Model pengembangan pariwisata yang berkelanjutan yang akan berdampak bagi kehidupan masyarakat di pedesaan. Program desa wisata yang dibentuk pemerintah secara langsung telah mampu memberdayakan masyarakat desa dalam melakukan aktivitas pariwisata. Program desa wisata memberikan wewenang yang besar kepada pemerintah desa bersama masyarakat untuk

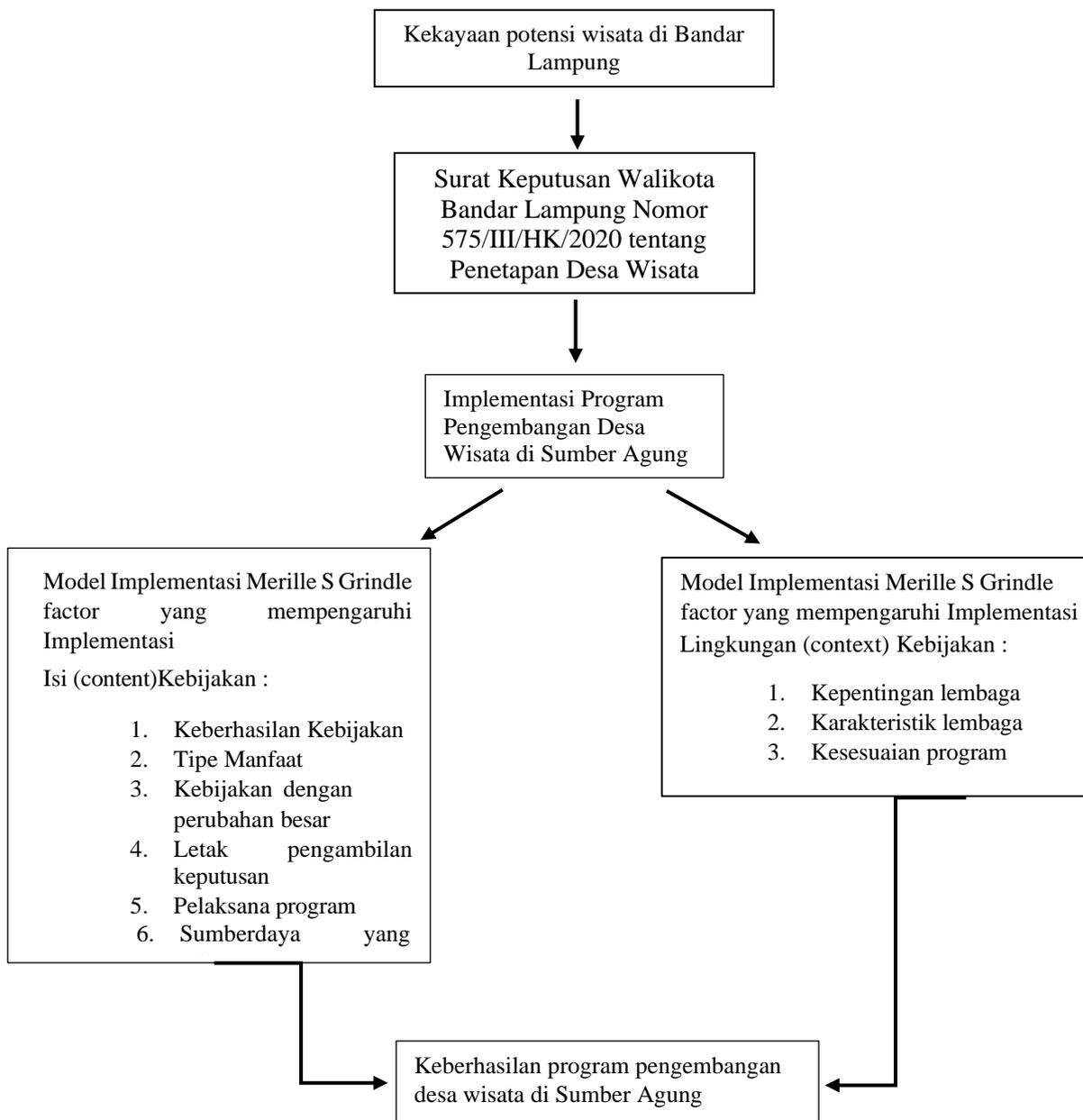
mengelola program desa wisata mulai dari tahap perencanaan sampai pada implementasi serta pengawasan. Tujuan pariwisata adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat, hal tersebut sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 4 (A, B, C, D), yang menyatakan bahwa pariwisata bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran serta melestarikan alam, lingkungan. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 1 juga menyatakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lainnya selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat.

Desa wisata merupakan wujud kombinasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang dikemas dalam suatu pola kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku sehingga menjadikan desa tersebut sebagai tujuan wisata. Desa wisata adalah bentuk industri pariwisata yang berupa kegiatan perjalanan wisata identik meliputi sejumlah kegiatan yang bersifat mendorong wisatawan sebagai konsumen agar menggunakan produk dari desa wisata tersebut atau melakukan perjalanan wisata ke desa wisata. Unsur produk pariwisata terdiri dari angkutan wisata, atraksi wisata, dan akomodasi pariwisata.

Dalam hal ini Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung bertujuan untuk membentuk tiga destinasi desa wisata dan dapat mendaftarkan ke tiga desa tersebut ke dalam ADWI (Anugrah Desa Wisata Indonesia) yang menjadi turunan dari program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Penilaian dalam ADWI 2023 didasarkan pada lima kategori utama. Yaitu; daya tarik pengunjung, *homestay* dan toilet, *digital* dan kreatif, *souvenir*, serta kelembagaan desa wisata dan sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability* (CHSE) yang berstandar nasional.

2.6 Kerangka Pikir

Pelaksanaan Program Pengembangan Desa Wisata di Sumber Agung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui implementasi sebuah program pengembangan desa wisata dalam mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan Merilee S Grindle dengan memperhatikan isi kebijakan dan lingkungan kebijakan.



Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang diterapkan pada penelitian ini ialah tipe penelitian deskriptif melalui metode kualitatif. Peneliti menggunakan metode kualitatif karena ingin mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh serta mendalam dengan menggambarkan kondisi atau fenomena yang sebenarnya terjadi selama penelitian lapangan dengan memberikan pertanyaan terbuka kepada informan. Penelitian ini hanya menggambarkan, mengungkapkan, menceritakan dan meringkas berbagai kondisi dan situasi yang ada. Jenis penelitian ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam tentang Implementasi Program Pengembangan Desa Wisata di Sumber Agung.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat diperlukan dalam sebuah penelitian karena fokus penelitian mampu membatasi ruang lingkup pada penelitian, sehingga peneliti bisa menetapkan keputusan yang tepat terkait data yang diterapkan guna melakukan penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, Pada penelitian ini, fokus utamanya terletak pada Implementasi Program Pengembangan Desa Wisata Sumber Agung yang mengacu pada Sarana Prasarana, Infrastruktur, serta fasilitas Desa Wisata Sumber Agung masuk kedalam nominasi jajaran Anugrah Desa Wisata Indonesia (ADWI) maka fokus penelitian yang akan diteliti dari Implementasi Program Pengembangan Desa Wisata di Sumber Agung melalui Teori Merilee S. Grindle dalam keberhasilan suatu program yaitu :

1. Isi (*Content*) Kebijakan :

1) Kepentingan yang mempengaruhi Program Desa Wisata

Pada indikator ini melihat kepentingan yang dapat mempengaruhi

implementasi kebijakan dari Program Pengembangan Desa Wisata di Sumber Agung yang sudah berjalan empat tahun terakhir.

2) Tipe manfaat yang diberikan program pengembangan desa wisata

Pada indikator ini Program Pengembangan Desa Wisata harus memfokuskan tipe manfaat yang diberikan baik untuk Dinas Pariwisata, Masyarakat, maupun pihak Swasta, sehingga memiliki kesesuaian program dengan kelompok sasaran.

3) Kebijakan dengan perubahan besar

Perubahan besar yang terjadi setelah program pengembangan desa wisata. Program pengembangan desa wisata bertujuan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Sumber Agung.

4) Letak pengambilan keputusan lembaga yang terlibat dalam program pengembangan desa wisata.

Program pengembangan Desa Wisata Sumber Agung memiliki suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan dan ketepatan sasaran program.

5) Pelaksana program

Pelaksanaan Program Pengembangan Desa Wisata, melihat sebuah program yang harus didukung dengan pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel.

6) Sumberdaya yang dilibatkan

Sumberdaya yang ada di Sumber Agung mencakup Sumber Daya material dan non material yang mendukung program Desa Wisata di Sumber Agung.

2. Lingkungan (*Context*) Kebijakan

1) Kepentingan Lembaga yang terlibat dalam program pengembangan desa wisata

Suatu kebijakan dalam pelaksanaannya melibatkan banyak kepentingan yang membawa pengaruh terhadap implementasinya, lembaga yang

memiliki kepentingan adalah Dinas Pariwisata, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan POKDARWIS.

- 2) Karakteristik Lembaga yang terlibat dalam program pengembangan desa wisata

Pelaksana program pengembangan Desa Wisata ini harus melihat suatu kebijakan, pelaksanaannya juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

- 3) Kesesuaian Program

Kesesuaian program pengembangan desa wisata dengan Masyarakat harus jelas dan bertujuan. Daya tanggap masyarakat Sumber Agung dapat menyesuaikan diri dengan program yang disediakan.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dikerjakan pada Desa Wisata Sumber Agung, Kemiling, Bandar Lampung. Lokasi desa wisata sumberagung ini berada di Kota Bandar Lampung yang memiliki potensi wisata baik alam dan buatan, lokasi ini dipilih sebab penulis menemukan fenomena pada program pengembangan desa wisata karena akses yang mudah dan dapat menarik lebih banyak pengunjung karena masih berada di Kota Bandar Lampung serta penunjang komponen wisata yang masih berkembang. Walaupun terletak di Kota Bandar Lampung didapati masih ada kekurangan baik secara infrastruktur serta beberapa komponen pariwisata padahal letak lokasi yang masih berada di Kota Bandar Lampung dapat menjadi daya tarik akan potensi desa wisata yang menyuguhkan keindahan kelestarian alam di Bandar Lampung, oleh karena itu Program Pengembangan Desa Wisata di Sumber Agung dapat memaksimalkan potensi yang ada agar dapat mensejahterakan antar pihak.

3.4 Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data atau informasi diperoleh peneliti. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Data Primer** Data primer adalah sumber data asli yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama. Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti sebagai pengumpul data (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.
2. **Data Sekunder** Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua. Data sekunder adalah data tambahan sebagai pelengkap data primer. Sumber data sekunder tidak memberikan data secara langsung kepada peneliti sebagai pengumpul data, namun data diperoleh melalui orang lain atau lewat dokumen, buku, foto dan lain sebagainya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku, skripsi, jurnal, artikel dan data atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5 Instrumen Penelitian

1. **Pedoman wawancara.** Pedoman wawancara dibuat untuk mempermudah proses wawancara dengan informan penelitian sebagai alat bantu yang berupa lembar pertanyaan.
2. **Alat tulis.** Peneliti membutuhkan alat tulis seperti buku catatan dan pena untuk mencatat hal-hal yang penting saat proses pengumpulan data khususnya saat melakukan observasi.
3. **Alat pengambil gambar.** Peneliti akan melakukan pengambilan gambar yang dapat berupa foto atau video saat observasi dan wawancara berlangsung.
4. **Alat perekam suara.** Alat rekam sebagai pelengkap bentuk riset yang ada di lapangan untuk melengkapi catatan-catatan wawancara.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, terdapat tiga macam metode yang digunakan dalam mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Esterberg (Sugiyono, 2013) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab mengenai topik tertentu, sehingga dapat dikonstruksikan makna di dalam topik tersebut.

Teknik wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan wawancara semi struktur, dimana peneliti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber atau informan secara tidak berurutan namun masih tetap sesuai dengan pedoman pertanyaan yang telah dibuat terkait dengan penerapan program Pengembangan Desa Wisata Di Sumber Agung. Berikut yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu:

Tabel 4. Data Informan

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Eva Dwi cahyarani S.H.,M.H	Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung	Sebagai pelaksana Program PengembanganDesa Wisata Sumber Agung
2.	Indra Pradya	Staf Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung	Sebagai Penanggung Jawab Infrastruktur Transportasi Kota Bandar Lampung
3.	Dedy Sutioso S.Tnt	Kepala Bidang Binamarga Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung	Sebagai Penanggung Jawab Infrastruktur Transportasi Kota Bandar Lampung
4.	Dharma	POKDARWIS	Sebagai pelaksana Program PengembanganDesa Wisata Sumber Agung
5.	Muhammad Fadhil	Pengunjung	Peserta Kegiatan Outbond Desa Wisata
6.	Eprilia Mega	Tour and Travel Agent	Peserta Kegiatan Outbond Desa Wisata

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

2. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun langsung ke Desa Wisata Sumberagung untuk melakukan pengamatan terhadap fenomena yang ingin diteliti atau hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, aktivitas, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Hasil dari melakukan observasi dapat berupa gambaran yang ada di lapangan dalam bentuk sikap, tindakan, pembicaraan, maupun interaksi interpersonal. Peneliti melakukan observasi di Desa Wisata Sumber Agung, sebagai tempat pelaksanaan Program Pengembangan Desa Wisata, observasi yang dilakukan peneliti melihat kawasan Desa Wisata Sumber Agung, terdapat penanda tempat Desa Wisata yang kecil, serta papan arah menuju ke

beberapa tempat wisata seperti perkebunan kemiri, gula aren, serta penanda arah menuju air terjun batu lapis. Selain itu, peneliti mengobservasi fasilitas serta sarana dan pra sarana di Desa Wisata Sumber Agung, terdapat jarak yang jauh menuju toilet dari tempat desa wisata, lahan parkir yang kurang memadai, serta pondokan tempat istirahat atau menduh yang berjarak cukup jauh. Observasi peneliti juga menghasilkan, penyediaanya alat alat trekking serta camping yang disediakan untuk wisatawan yang ingin mengambil paket wisata yang ada di Desa Wisata Sumber Agung.

3. Dokumentasi

Merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan mempelajari data-data yang telah didokumentasikan. Data-data tersebut dapat berupa tulisan, buku-buku, arsip, dokumen, angka, gambar dan dokumen lain yang dapat mendukung proses penelitan penulis. Dokumentasi dalam penelitian ini berarti, mengumpulkan data berupa dokumen atau laporan yang menunjang penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Program Pengembangan Desa Wisata di Sumber Agung adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Dokumentasi

No	Nama Dokumen
1.	Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kepariwisataaan, pasal 7 ayat 2
2.	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah (RIPPARDA) Kota Bandar Lampung Tahun 2022-2025 kawasan pariwisata ditetapkan seluas ± 188 hektar meliputi Kecamatan Teluk Betung Timur, Kecamatan Tanjung Barat; Kecamatan Teluk Betung Barat, dan Kecamatan Kemiling. Kecamatan Kemiling
3.	Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 575/III/HK/2020 tentang Penetapan Desa Wisata yang menyatakan bahwa kawasan Pulau Pasaran, Sumber Agung (Tahura Wan Abdul Rachman), dan Sumur Putri
4.	Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung Nomor 800/46/II.20/2020. Penetapan POKDARWIS Di Sumber Agung.
5.	Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor1 TAHUN 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan
6.	Rencana Strategis Dinas Pariwisata Tahun 2021-2026 Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2021

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014) pengolahan data kualitatif bersifat interaktif dan berulang ulang sampai data

lengkap dan jenuh. Ketika menganalisis data, peneliti akan membaca atau mempelajari data dan memberikan kode atau kata kunci pada data, lalu mengurutkan dan mengklasifikasikan data, sehingga menemukan hubungan antara data dan fenomena untuk menghasilkan penemuan-penemuan baru. Analisis data dilakukan melalui tiga langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi Data adalah ulasan dari semua aktivitas yang direkam yang diperoleh oleh teknik observasi, wawancara, dan lain sebagainya. Reduksi data merupakan kegiatan abstrak atau rangkuman data dalam laporan evaluasi sistem dan fokus pada hal-hal penting.

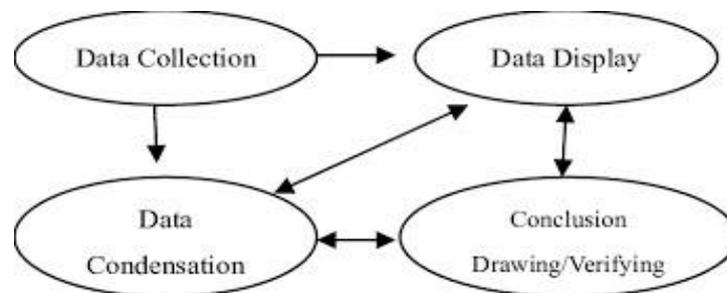
2. *Display* Data

Display Data adalah untuk meringkas poin utama, dan kemudian mengaturnya menjadi deskripsi naratif dan sistematis, agar lebih mudah ditemukan dalam menentukan tema sentral berdasarkan fokus atau ekspresi unsur-unsur yang dievaluasi, dan memfasilitasi penelitian untuk melihat deskripsi elemen yang dievaluasi keseluruhan. *Display* data menampilkan data yang disajikan dalam beberapa tampilan matriks, grafik, bagan, diagram alur, gambar, dan lain sebagainya.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data dilakukan untuk mencari makna dari data yang terkumpul lebih teliti. Kegiatan ini dilakukan dengan mencari pola, tema, bentuk, hubungan, persamaan dan perbedaan, faktor yang mempengaruhi. Hasil dari kegiatan ini adalah kesimpulan secara keseluruhan, lengkap dari hasil penelitian.

Secara skematis yang ada pada model analisis data Miles dan Huberman dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2. Teknik analisis menurut Miles and Huberman

Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014)

3.8 Teknik Keabsahan Data

Teknik uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk menentukan apakah data tersebut sah atau tidak, untuk itu perlunya dilakukan teknik pemeriksaan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria tertentu (Wekke, 2019). Dalam penelitian ini menggunakan empat kriteria dalam menguji keabsahan menurut Sugiyono (2022) sebagai berikut:

1. Uji Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Kredibelnya suatu data apabila memiliki persamaan antara data yang dilaporkan oleh penulis dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di objek penelitian. Agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya, maka kegiatan yang akan dilakukan antara lain:

1) Perpanjangan waktu pengamatan

Pada aktivitas ini, penulis akan kembali ke objek penelitian untuk dilakukannya observasi dan melakukan wawancara kembali dengan narasumber baru atau dengan yang sudah pernah ditemui sebelumnya. Langkah yang dilakukan yaitu melakukan observasi untuk memastikan apakah data yang diperoleh sebelumnya valid dengan kondisi pada saat terjalin lagi ke objek penelitian tersebut.

2) Triangulasi

Penggunaan teknik triangulasi pada penelitian ini bertujuan untuk

meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, ataupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (Wekke, 2019) teknik triangulasi merupakan teknik yang memanfaatkan suatu hal lain di luar data untuk dilakukannya pengecekan atau sebagai pembanding atas temuan data. Penulis melakukan pengecekan dengan menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan hasil data yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dengan kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap sumber data yang berbeda. Berbagai data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis untuk menemukan pandangan apa saja yang sama, berbeda, dan lebih spesifik sehingga dapat membantu peneliti dalam memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kesahihan.

2. Uji Keteralihan (*Transferability*)

Diterapkan guna mempermudah pembaca memahami temuan penelitian, sehingga peneliti dapat memberikan laporan penjelasan secara terperinci, sistematis serta bisa dipercaya.

3. Uji Kebergantungan (*Dependability*)

Pada penelitian kualitatif, uji *dependability* dikerjakan melalui pengawasan peneliti, pada keseluruhan proses penelitian oleh pembimbing. Peneliti harus dapat menunjukkan bagaimana cara menentukan masalah atau fokus, memasuki lapangan, menetapkan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, serta menarik kesimpulan.

4. Uji Kepastian (*Confirmability*)

Uji *confirmability* adalah untuk menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Dalam artian hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, untuk itu hasil penelitian harus dapat disertakan proses penelitian sehingga memenuhi standar *confirmability* yang sama artinya dengan uji *dependability*, sehingga pengujian dapat dilakukan secara bersamaan

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan pada saat di lapangan mengenai penerapan Program Pengembangan Desa Wisata di Sumber Agung, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada model implementasi Grindle *content* dalam isi kebijakan berjalannya Program Pengembangan Desa Wisata dalam empat tahun terakhir, dapat disimpulkan Program pengembangan Desa Wisata di Sumber Agung saat ini berjalan dengan beberapa pihak yang terlibat. Dimulai dari Dinas Pariwisata (key actors), Tour and travel agent (supporting actors), POKDARWIS(supporting actors) yang memiliki peran dan kepentingan yang berbeda. Kepentingan setiap pihak yang terlibat memiliki pengaruh yang berdampak pada program baik secara sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan. Selain itu manfaat yang dihasilkan dari berjalannya program ini untuk setiap pihak menguntungkan seluruh pihak yang terlibat, secara langsung POKDARWIS menerima manfaat terbanyak serta dukungan dari seluruh pihak yang terlibat selama empat tahun terakhir. Banyak perubahan yang terjadi setelah adanya pelaksanaan program ini, pemanfaatan Taman hutan Raya Wan Abdurrahman menjadi salah satu contoh perubahan besar karena dalam pemanfaatannya memberikan efek kepada masyarakat sekitar, berinovasi nya sebuah paket ekowisata dan pelestarian lingkungan yang menyebabkan perubahan baik pada sosial dan ekonomi. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak yang terlibat seperti Dinas Pariwisata yang menjadi key actors baik merancang dan menjalankan program ini. Dinas pariwisata memberikan payung hukum untuk Desa Wisata Sumber Agung. POKDARWIS dan Tour Agent berkoordinasi dengan penyediaan paket wisata yang ada di Desa Wisata Sumber Agung. Namun, Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung sebagai penanggung jawab program ini jarang

melakukan evaluasi terkait pelaksanaan program ini, tidak ada rapat ataupun pertemuan mengenai perkembangan program yang telah berjalan selama empat tahun terakhir. Pada pelaksanaan program pengembangan desa wisata ini, setiap pihak yang terlibat memiliki tujuan yang berbeda namun bervisi satu yaitu mengembangkan potensi yang ada pada desa wisata di Sumber Agung. Dinas pariwisata melaksanakan program ini dengan melibatkan POKDARWIS melakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pembekalan pariwisata, Tour Agent yang melaksanakan program ini dengan mempromosikan Desa Wisata Sumber Agung serta POKDARWIS sebagai pelaksana program ini secara teknis, membuat program ini berjalan dengan satu misi yaitu mengembangkan potensi Desa Wisata Sumber Agung. Hal ini didukung dengan sumber daya yang dilibatkan dalam pelaksanaan program pengembangan desa wisata. Dinas pariwisata melibatkan sumberdaya baik secara material dan non material seperti penyediaan alat camping dan trekking serta penyuluhan yang melibatkan aktor pelaku pariwisata seperti Tour Guide dan kerjasama dengan beberapa Universitas di Bandar Lampung. POKDARWIS yang melibatkan masyarakat sekitar dalam berjalannya program ini serta Tour Agent yang melibatkan sumberdaya pengguna promosi online melalui beberapa platform. Namun sumberdaya yang dilibatkan seperti infrastruktur serta sarana dan prasarana yang memadai belum begitu dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kewenangan. Untuk mencapai ADWI dibutuhkan banyak pembenahan baik secara kesiapan digital hingga sumberdaya, namun banyak hal yang harus dibenahi oleh pihak pihak yang terlibat dalam program ini karena sumber daya berperan sangat penting dalam kelangsungan program pengembangan desa wisata.

Pada Model Implementasi Grindle Context atau Lingkungan kebijakan yang terjadi pada Program Pengembangan Desa Wisata ini memiliki, kepentingan pada setiap lembaga yang berbeda dengan tujuan yang berbeda namun memiliki keterlibatan terhadap program ini menjadikan karakteristik lembaga berbeda beda, rezim pemerintahan yang mendukung program ini menjadi salah satu acuan dalam keberlangsungan program ini, pemerintah kota Bandar Lampung mendukung secara penuh dengan dibuktikannya pengesahan 12

Desa Wisata dan 126 POKDARWIS melalui surat keputusan Walikota Bandar Lampung yang memiliki karakteristik proaktif dan inklusif dalam berjalannya program ini memiliki kesesuaian program yang selaras dalam berjalannya selama empat tahun terakhir, setiap pihak yang terlibat mereka melaksanakan tugasnya dan tanggung jawab masing masing dan menghasilkan manfaat dan banyak kesesuaian yang terjadi pada program ini. Penelitian ini memberikan kontribusi positif dalam implementasi dari Program Pengembangan Desa Wisata di Sumber Agung dan untuk meningkatkan kinerja dari tiap aktor yang terlibat dalam program ini. Adapun faktor pendukung dalam berjalannya program ini yaitu Sumber Agung memiliki potensi alam yang mendukung, seperti pegunungan, air terjun, dan pemandangan indah yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Keindahan alam ini menjadi modal penting dalam menarik pengunjung untuk menikmati wisata alam dan ekowisata. Dan Semangat masyarakat dalam mengembangkan desa wisata juga menjadi pendorong utama. Warga lokal yang aktif terlibat akan menambah daya tarik dan keunikan desa, sebab pengunjung dapat merasakan keaslian budaya dan tradisi yang masih hidup dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan pada pelaksanaan program ini yang telah berjalan selama empat tahun terakhir mengalami banyak perubahan pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun ditemukan banyak kelemahan yang terjadi dalam pengembangan pariwisata dimulai dari ketidak konsistenan para pihak yang terlibat, kurangnya evaluasi atau monitoring selama program ini berjalan, serta kurangnya koordinasi dengan beberapa pihak terkait infrastruktur untuk pengembangan desa wisata di Sumber Agung yang bertujuan memasukan Desa Wisata ini kedalam jajaran Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI).

Faktor penghambat program pengembangan desa wisata ini adalah Akses jalan yang belum memadai menjadi hambatan utama bagi wisatawan untuk mencapai desa wisata Sumber Agung. Minimnya infrastruktur, seperti jalan, transportasi umum, dan fasilitas umum seperti toilet dan tempat istirahat, dapat menurunkan minat kunjungan wisatawan. Pengembangan desa wisata membutuhkan dana yang cukup besar untuk memperbaiki infrastruktur,

melakukan promosi, serta meningkatkan fasilitas dan pelayanan. Selain itu, ketersediaan dana sering kali terbatas, sehingga pelaksanaan program menjadi terhambat. Pengembangan desa wisata membutuhkan dana yang cukup besar untuk memperbaiki infrastruktur, melakukan promosi, serta meningkatkan fasilitas dan pelayanan. Selain itu, Banyaknya destinasi wisata di sekitar Bandar Lampung bisa menjadi tantangan bagi Sumber Agung dalam menarik minat wisatawan. Untuk bisa bersaing, desa ini harus menawarkan sesuatu yang unik atau berbeda yang tidak ditemukan di tempat wisata lain.

Selain itu, penelitian ini juga belum secara mendalam membahas aspek keberlanjutan penerapan Program Pengembangan Desa Wisata di desa lainnya. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi keberlanjutan, seperti pelatihan pariwisata, bimbingan teknis, dan kegiatan atraksi wisata, perlu diidentifikasi dan dikaji lebih lanjut. Hal ini penting untuk memastikan penerapan Program Pengembangan Desa Wisata dapat terus berjalan secara optimal dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan keterbatasan ini, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan bermanfaat bagi Program Pengembangan Desa Wisata.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan sebelumnya, dari kesimpulan tersebut dijelaskan bahwa Implementasi Program Pengembangan Desa Wisata di Sumber Agung belum terlaksana secara optimal, namun dengan beberapa hambatan. Oleh karena itu peneliti kemudian memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perencanaan dan pelaksanaan yang strategis :

- 1) Dinas Pariwisata perlu menyusun rencana pengembangan yang terstruktur dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pengelola wisata, dan swasta.

- 2) Laksanakan rencana pengembangan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
- 3) Implementasikan sistem pengawasan dan monitoring yang efektif untuk memastikan setiap tahap pelaksanaan berjalan sesuai rencana.

2. Peningkatan Infrastruktur

- 1) Prioritaskan pengembangan infrastruktur penunjang wisata, seperti akses jalan, fasilitas sanitasi, tempat parkir, serta fasilitas umum lainnya, agar wisatawan merasa nyaman dan tertarik untuk berkunjung.
- 2) Memperhatikan standar kualitas layanan wisata, seperti kebersihan, keamanan, dan kenyamanan, dipenuhi. Adakan pelatihan rutin bagi pengelola wisata dan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Hal ini akan berdampak positif pada pengalaman wisatawan dan reputasi desa wisata.
- 3) Fokus pada perbaikan dan pengembangan akses jalan menuju destinasi wisata utama. Jalan yang baik dan aman akan memudahkan wisatawan untuk mencapai lokasi desa dan meningkatkan kenyamanan selama kunjungan.
- 4) Sediakan fasilitas penunjang yang mendukung kegiatan wisata, seperti pusat informasi wisata, ruang pameran, dan area istirahat. lakukan pelatihan untuk masyarakat mengenai prosedur keselamatan dan penanganan situasi darurat.

3. Evaluasi secara berskala

- 1) Adakan survei dan diskusi dengan masyarakat lokal untuk memahami pandangan mereka tentang dampak program terhadap kehidupan mereka dan partisipasi mereka dalam program.
- 2) Diadakan rapat tahunan agar dapat melihat sejauh apa program pengembangan desa wisata ini berhasil atau tidak dalam pelaksanaannya.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan Program Pengembangan Desa Wisata di Sumber Agung dapat terus mengoptimalkan efektivitasnya dan memberikan manfaat yang maksimal bagi Masyarakat di Sumber Agung yang menjadi target utama berjalannya program ini. Peningkatan

berkelanjutan dalam semua aspek yang dievaluasi. akan membantu memastikan bahwa sistem ini tetap menjadi alat yang fleksibel, cepat, mudah digunakan, dan aman bagi seluruh pengguna. Melalui Langkah langkah ini, Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung dapat terus memperkuat posisinya sebagai lembaga yang efisien, efektif, dan responsif terhadap peningkatan pariwisata di Bandar Lampung hingga internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Cooper, Phillip J. dkk. (1998). *Public Administration for the Twenty-First Century*. USA : Harcourt Brace & Company
- Cooper, Chris. (1993). *Tourism: Principles & Practise*. England: Longman Group Limited.
- Baud-Bovy, M., & Lawson, F. (1998). *Tourism and recreation: handbook of planning and Design*. Butterworth-Heinemann Ltd.
- Dunn, N. William. (1999). *Analisis Kebijakan (terjemahan)*, Yogyakarta : Gajahmada University PDokumen Buku Pedoman Desa Wisata 2021. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Edisi II, Juni <https://www.ciptadesa.com/2021/06/pedoman-desa-wisata.html>
- Damanik, J., & Weber, H. F. (2006). *Perencanaan ekowisata: Dari teori ke aplikasi*. Yogyakarta: Andi Offset
- Darmawan, D. S. (2019). Pengaruh Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas, Ansilari Terhadap Kepuasan Wisatawan Dio Pantai Gemah Kabupaten Tuilungagung. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb*, 8(1) <https://Jimfeb.Ub.Ac.Id/Index.Php/Jimfeb/Article/View/6225/5461#>
- Desa Ponggok Desa Wisata Air Desa Ponggok Official Dialogue Space Of Ponggok Village. (2012). *Sejarah Desa Ponggok*. From < <https://Ponggok.Desa.Id/Sejarah-Desa/> > [7 Maret 2021]
- Edward III. George C. (1980). *Implementing Poblec Policy*. Washinton : Congressional Quarterly Inc.
- Fitari, Y., & Ma'rif, S. (2017). Manfaat Pengembangan Desa Wisata Wonolopo terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat Lokal. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 5(1), 29-44.
- Grindle, Merelee S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third world*. New York : Princeton University Press
- Irwan, and Andi Agustang. (2021). Strategi Keberdayaan Masyarakat Menuju Desa Wisata Berbasis Masyarakat Yang Berkelanjutan. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional dengan tema Penguatan Riset, Inovasi, dan Kreativitas Peneliti Di Era Pandemi Covid-19
- Kartika dan Wahyono. (2019). Pengaruh Perkembangan Infrastruktur Dasar Pariwisata Terhadap Minat Kunjungan Wisatawan Candi Gedong Songo Kecamatan Bandungan. *Jurnal Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Dan Kota)*, Vol (8)(4) 217–225.

- Kemenparekraf. (2024). Menparekraf Resmi Luncurkan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024. Tersedia di <https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-menparekraf-resmi-luncurkan-anugerah-desa-wisata-indonesia-adwi-2024>
- Luthfi, M. (2013). Pengembangan Pariwisata Dan Dampak Sosial Ekonomi Di Bandar Lampung. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN MANAJEMEN*, 2(1).
- Moleong, Lexy J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. (ed XXVII). Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muliawan, H. (2008). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Konsep dan Implementasi.
- Nugroho, Riant. (2008). Public Policy. Jakarta : PT. Gramedia.
- Nugraha, R. N., & Mawo, M. L. (2023). A Daya Tarik Wisata Taman Ismail
- Primadany, S. R. (2013). Analisis strategi pengembangan pariwisata daerah (studi pada dinas kebudayaan dan pariwisata daerah kabupaten nganjuk) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025 Pasal 2 Nomor 8.
- Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Kota Bandar Lampung Tahun 2022-2025
- Rahmah, H. R. F., Nur'Aini, S., Septia, W., Ramaida, P., Novarida, D., Aziz, S., & Febryanti, B. (2023). Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Destinasi Wisata Di Era New Normal. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(4), 71-83.
- Raharjo, T. W. (2021). Pengembangan Desa Wisata (Model Pengembangan Kattasikung Di Jawa Timur). Jakad Media Publishing.
- Sanjaya, R. B. (2018). Strategi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Kemetul, Kabupaten Semarang. *Jumpa*, 5(1), 91-110.
- Sunaryo, B. (2013). Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- Utama, I. G. B. R. (2015). Daya tarik wisata kota Denpasar Bali. Undhira: Badung.
- Winarno, B. (2005). Teori dan Proses Kebijakan Publik. (ed III). Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wanda, I. B. K., & Pangestuti, E. (2018). Pengaruh pengembangan komponen

destinasi Wisata terhadap kepuasan pengunjung. (Survei pada Pengunjung Situs Trowulan). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 55(3), 83-91. <http://Administrasibisnis.Studentjournal.Ub.Ac.Id/Index.Php/Jab/Article/View/2307/2703>

Wiendu, N. (1993). *Concept, Perspective And Challenges*, Makalah Bagian Dari Laporan Konferensi Internasional Mengenai Pariwisata Budaya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Wisata Air Klaten Favorit saat Libur Nataru (2021) from <<https://www.solopos.com/> [26, Desember 2021].

Wiwin, I. W. (2019). Faktor Sukses Dalam Pengembangan Wisata Pedesaan. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Agama Dan Budaya*, 4(2), 25-29. <https://Ejournal.Ihdn.Ac.Id/Index.Php/PB/Article/View/1123/960>

Yoeti, O. A. (1996). *Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pt. Pradnya Paramita.

Yoeti, O. A. (2013). *Pemasaran Pariwisata Terpadu: Bandung Angkasa*.

Zakaria, F., & Suprihardjo, R. (2014). Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan: *Jurnal teknik ITS*, 3(2), C24C249. <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/194629-ID-KonsepPengembangan-Kawasan-Desa-Wisata.Pdf>

